

**TRAGEDI 1965 DI INDONESIA PERSPEKTIF  
KAMBING HITAM RENE GIRARD**

**SKRIPSI**

**Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Sastra  
Program Studi Ilmu Sejarah**



**Oleh :**

**Silvia Pristi Werdininggar**

**NIM : 094314005**

**PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH  
JURUSAN ILMU SEJARAH FAKULTAS SASTRA  
UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
YOGYAKARTA**

**2015**

SKRIPSI  
**TRAGEDI 1965 DI INDONESIA**  
**PERSPEKTIF KAMBING HITAM RENE GIRARD**

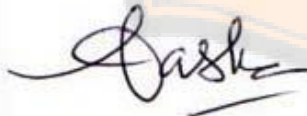
Disusun Oleh :

**Silvia Pristi Werdininggar**

**NIM : 094314005**

Telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing



Dr. F.X. Baskara T. Wardaya, SJ

Tanggal

4 Mei 2015

SKRIPSI

**TRAGEDI 1965 DI INDONESIA PERSPEKTIF  
KAMBING HITAM RENE GIRARD**

Disusun Oleh :

**Silvia Pristi Werdininggar**

**NIM : 094314005**

Dipertahankan di depan panitia penguji Program Studi Sejarah dan dinyatakan diterima pada tanggal 23 Juli 2015.

Susunan Panitia Penguji :

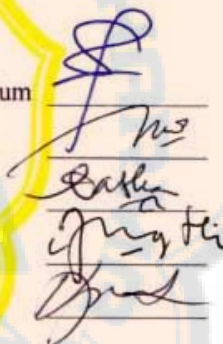
Ketua : Drs. Silverio Raden Lilik Aji Sampurno, M. Hum

Sekretaris : Drs. Hb. Hery Santosa, M. Hum

Anggota : Dr. F.X. Baskara T. Wardaya, S.J.

Dr. Lucia Juningsih, M. Hum

Dr. H. Purwanta, M.A.



Yogyakarta, 31 Juli 2015

Fakultas Sastra

Universitas Sanata Dharma

Dekan



Dr. F. X. Siswadi, M. A.

## PERSEMBAHAN

*Dengan penuh syukur Skripsi ini kupersembahkan untuk, kedua orangtuaku J.  
Sumardianta dan Victoria Prastiwi Utami, kedua adikku Irene Ria Nuringtyas  
dan Gabriella Merdikanti.*



## MOTTO

*GREAT THINGS NEVER CAME FROM COMFORT ZONE*


*- Unknown -*



## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Dengan ini saya menyatakan bahwa isi dalam karya skripsi ini merupakan karya sendiri dan belum pernah saya ajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi. Skripsi ini tidak memuat karya orang lain atau suatu lembaga, kecuali bagian-bagian tertentu yang dijadikan sumber dan dimuat dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 25 April 2015



Silvia Pristi Werdininggar

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma :

Nama : Silvia Pristi Werdininggar

Nomor Mahasiswa : 094314005

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan

Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul :

**TRAGEDI 1965 DI INDONESIA  
PERSPEKTIF KAMBING HITAM RENE GIRARD**


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal : 29 April 2015

Yang menyatakan



( Silvia Pristi Werdininggar )

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa akhirnya skripsi ini dapat terwujud. Setelah melalui berbagai cobaan dan rintangan, revisi demi revisi yang harus dikerjakan dan berbagai buku serta data lainnya yang harus dibaca. Terkadang ada satu titik dimana rasanya mulai jenuh dan enggan untuk menulis skripsi tetapi bila mengingat waktu yang kunjung habis dan berbagai impian yang harus dicapai untuk masa mendatang saya kembali bersemangat untuk menulis dan menyelesaikan skripsi ini.

Dalam menyusun skripsi ini penulis banyak dibantu serta mendapat dukungan moral dan semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Kedua orangtuaku J. Sumardianta dan Victoria Prastiwi Utami, terikasih untuk segala dukungan, perhatian serta kesabaran dalam menunggu penulis menyelesaikan studi di Ilmu Sejarah.
2. Kepada para Dosen Ilmu Sejarah Sanata Dharma, Dr. H. Purwanta, M. A, Dr. Lucia Juningsih, M. Hum, Drs. Ign. Sandiwan Suharso, Drs .Hb. Hery Santoso, M. Hum, Drs. Silverio Raden Lilik Aji Sampurno, M. Hum.
3. Secara khusus penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada Dr. Baskara T. Wardaya, SJ selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya dan dengan sabar membimbing skripsi ini hingga layak dinyatakan untuk diujikan.



4. Kepada teman-teman Ilmu Sejarah angkatan 2009 terimakasih untuk kebersamaan dan kerjasamanya selama ini.
5. Kepada Popon, Rangga, teman-teman Ilmu Sejarah angkatan 2010-2014 yang selalu menjadi rekan diskusi ketika kuliah dan menulis skripsi.
6. Untuk Yohanes Sigit Permana, terimakasih untuk dukungannya dan menjadi partner yang baik.
7. Sekretaris Jurusan Mas Tri, terimakasih atas pelayanan administrasinya yang selalu cepat dan tanggap melayani kebutuhan mahasiswa.
8. Seluruh teman-teman, sahabat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, atas sumbangan waktu, pikiran dan tenaga dalam kesempatannya membantu saya menulis skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh untuk dikatakan sempurna. Oleh karena itu, penulis membuka diri bagi kritik dan saran, demi perbaikan dan pengembangan di masa mendatang.

Yogyakarta, 29 April 2015

Silvia Pristi Werdininggar

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....	vi
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii

## BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Pembatasan Masalah.....	9
D. Tujuan Penulisan.....	10
E. Manfaat Penulisan.....	10
F. Kajian Pustaka.....	11
G. Landasan Teori.....	15
H. Metode Penelitian.....	20
I. Sistematika Penulisan.....	21

## BAB II SITUASI POLITIK DI INDONESIA TAHUN 1965-1966

A. Gerakan 30 September 1965.....	23
-----------------------------------	----

B. Pembunuhan Massal Tahun 1965-1966 di Jawa.....	34
---	----

### **BAB III SIKAP PEMERINTAH ORDE BARU MENAFSIR DAN MENGAMBIL TINDAKAN TERHADAP TRAGEDI 1965**

A. Regim Orde Baru Berkuasa.....	41
B. Narasi Pemerintah Orde Baru Tentang Tragedi 1965.....	46

### **BAB IV MENGANALISA TRAGEDI 1965 DENGAN TEORI KAMBING HITAM RENE GIRARD**

A. Situasi Ekonomi-Politik di Indonesia Tahun 1950-1965 Sebagai Perwujudan “ <i>Chaos</i> ” .....	50
B. Pengejaran PKI Sebagai Tindak Pengambinghitaman.....	54
C. Orde Baru Berkuasa Sebagai Perwujudan Mimesis.....	59

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	69

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>71</b>
----------------------------	-----------

## **ABSTRAK**

### **TRAGEDI 1965 DI INDONESIA PERSPEKTIF KAMBING HITAM RENE GIRARD**

Dengan menggunakan teori Kambing Hitam Rene Girard, skripsi ini merupakan usaha mengkaji dan menganalisa pembantaian massal PKI serta simpatisannya pada tahun 1965-1966 di Indonesia. Menurut teori tersebut, kultur dalam sebuah masyarakat seringkali sangat rapuh, mudah pecah dan terbenam ke dalam konflik jika terjadi krisis. Ketika terjadi konflik maka masyarakat seperti itu akan mencari penyaluran kekerasan melalui kambing hitam. Korban kambing hitam biasanya berasal dari kalangan minoritas.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menguraikan sejauh mana teori Kambing Hitam Rene Girard relevan untuk menganalisa tragedi 1965 serta untuk menjelaskan bagaimana sikap pemerintahan pada masa Suharto menafsir dan mengambil tindakan terhadap peristiwa G30S.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yakni pengumpulan sumber, kritik sumber, analisis dan interpretasi, dan penulisan. Dalam pengumpulan sumber dilakukan kritik sumber sehingga dapat menghasilkan data yang dipercaya. Data yang sudah dikumpulkan kemudian dianalisis berdasarkan kerangka berpikir yang sudah ditentukan.

Hasil penelitian ini menunjukkan G30S merupakan suatu kudeta yang dilakukan oleh Suharto untuk merebut kekuasaan dari Sukarno sedangkan pembantaian massal PKI dan simpatisannya pada tahun 1965-1966 merupakan bentuk pengkambinghitaman yang dilakukan Suharto terhadap PKI. Setelah dilakukan penelitian dapat dilihat bagaimana relevansi teori Kambing Hitam Rene Girard untuk menganalisa tragedi 1965. *Pertama*, situasi krisis pada tahun 1950-1965 telah menyulut peristiwa G30S yang berujung pada pembunuhan massal tahun 1965-1966. *Kedua*, ketika terjadi konflik maka masyarakat akan mencari penyaluran kekerasan melalui kambing hitam. Dalam hal ini yang menjadi korban kambing hitam adalah PKI dan para simpatisannya. *Ketiga*, korban kambing hitam berasal dari kalangan minoritas. Pada kasus kekerasan tahun 1965-1966 yang menjadi korban kambing hitam adalah PKI, yang meskipun memiliki tiga juta anggota tetap dipandang sebagai minoritas.

**Kata Kunci:** Teori Kambing Hitam, G30S, Pembantaian Massal.

## **ABSTRACT**

### **THE 1965 TRAGEDY IN INDONESIA PERSPECTIVE SCAPEGOAT OF RENE GIRARD**

By using the scapegoat Rene Girard's theory, this thesis is an attempt to assess and analyze the mass murder of the PKI and its sympathizers in 1965-1966 in Indonesia. According to this theory, the culture in a society often very fragile, easily broken and immersed into a conflict if a crisis occurs. When there is a conflict, the community as it will look for distribution through scapegoat violence. Victims of scapegoat usually come from the minority.

The purpose of this paper is to outline the extent to which the theory of Rene Girard's scapegoat relevant to the analysis of the 1965 tragedy and to explain how the government's attitude during the Suharto to interpret and take action against the G30S.

This research is qualitative research. The method that used in the research is history method of collecting source, source criticism, analysis and interpretation, and writing. In the collection of source the research also doing criticism source so the data will be accurate. The data that has been collected will be analyzed based on a predetermined framework.

The results showed that G30S is a coup conducted by Suharto to seize power from Sukarno while mass murder PKI and its sympathizers in 1965-1966 is a form of scapegoating that carried Suharto to PKI. Having done the research it can be seen how the relevance of Rene Girard's scapegoat theory to analyze the 1965 tragedy. *First*, the crisis situation in 1950-1965 has fueled the G30S affair which led to the mass killings in 1965-1966. *Second*, when a conflict occurs then community will be look for distribution through scapegoat violence. In this case the victim and scapegoat is PKI and its sympathizers. *Third*, the victim scapegoat comes from the minority. In the case of violence in 1965-1966 that became victims scapegoat is PKI, which although it has three million members still regarded as a minority.

**Keywords:** Theory Scapegoat, G30S, Massacre.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk yang memiliki hasrat dan oleh karena itu mudah dikuasai kemarahan dan kegeraman. Ketika manusia menjadi marah maka ia bisa menjadi pembunuh yang mematikan. Menurut Rene Girard dalam teori kambing hitam, kultur suatu masyarakat bisa sangat rapuh dan mudah pecah. Ketika dalam suatu masyarakat terjadi konflik atau kekacauan politik, masyarakat biasanya akan mencari kambing hitam untuk dipersalahkan. Berkaitan masalah pencarian kambing hitam ini biasanya pula yang menjadi sasaran adalah pihak yang dipandang paling rentan, misalnya kaum minoritas. Kaum minoritas ini dijadikan kambing hitam entah bersalah atau tidak. Bahkan dalam banyak kasus ketika mereka tidak bersalah pun mereka tetap dijadikan korban kambing hitam.

Rene Girard merupakan salah satu pemikir besar abad ke-20 kelahiran Perancis 1923. Ia memberi contoh dengan memaparkan kasus pembantaian kaum Yahudi di Eropa pada abad ke-14. Pada saat itu terjadi kepanikan luar biasa di tengah masyarakat Eropa ketika wabah pes melanda pada pertengahan abad ke-14 (1347-1351). Wabah tersebut berasal dari Asia Tengah dan melalui orang-orang Tartar ditularkan ke seluruh Italia. Dalam waktu yang amat singkat wabah ini menjalar ke Prancis, Spanyol, Belanda dan negara-negara Eropa lainnya. Wabah

tersebut benar-benar ganas. Sesuai dengan keganasanya, wabah tersebut diberi nama *The Black Death* atau Maut Hitam. Korban terbanyak berasal dari kalangan orang miskin karena daya tahan tubuh mereka lemah akibat kurang pangan, sementara lingkungan mereka kumuh padat penduduk, sehingga mereka mudah tertular satu sama lain. Kulit penderita menjadi menghitam karena pendarahan subdermal. Wabah ini juga memukul Eropa secara ekonomis. Produktivitas ekonomi dan perdagangan menjadi lumpuh.<sup>1</sup>

Pada saat itu tak ada keterangan medis yang tuntas mengenai penyebab serta mengapa wabah itu mengganas. Beberapa kelompok fanatik menerangkan bahwa wabah itu merupakan hukuman dari Allah bagi manusia berdosa. Orang-orang lalu menuduh ini semuanya disebabkan oleh kesalahan orang Yahudi, yang oleh orang Kristen telah lama dianggap sebagai musuh karena penolakan mereka terhadap Kristus. Oleh karena itu bersamaan dengan menjangkitnya wabah pes tersebut dilakukan pengejaran dan pembunuhan besar-besaran terhadap orang Yahudi.<sup>2</sup>

Fanatisme dan semangat akan religi berkembang terutama di Eropa karena Maut Hitam. Beberapa kelompok masyarakat Eropa menyerang kelompok tertentu terutama orang Yahudi. Mereka mengira bahwa dengan melakukan itu, mereka akan membantu mengatasi masalah wabah Maut Hitam. Banyak terjadi penganiayaan serta penyerangan terhadap orang Yahudi. Pada bulan Agustus 1349, komunitas Yahudi di Mainz dan Cologne dimusnahkan. Sebelumnya pada bulan Februari, penduduk Strasbourg membunuh 2.000 penduduk Yahudi untuk

---

<sup>1</sup> Sindhunata, 2006, *Kambing Hitam Teori Rene Girard*, Jakarta: hal. 355

<sup>2</sup> *ibid.*, hlm. 356.

alasan yang sama. Hingga tahun 1350, 60 Komunitas besar dan 150 komunitas kecil Yahudi telah dimusnahkan.<sup>3</sup>

Girard mencoba menerangkan mengapa orang Yahudi dibunuh kala itu dalam tulisannya tentang Guillaume de Machaut.<sup>4</sup> Guillaume merupakan sastrawan dan komposer musik Prancis (1300-1377), yang salah satu karyanya adalah *Judgment of King Navarre*. Karya tersebut berbentuk puisi panjang. Gaya tutur katanya lazim pada puisi-puisi istana. Puisi tersebut menggambarkan wabah *black death* dan bagaimana orang Yahudi dikutuk dan dipersalahkan atas bencana tersebut.<sup>5</sup>

Dalam penuturannya tampak bahwa Guillaume secara pribadi ikut mengalami segala kebingungan yang disebabkan oleh bencana *Black Death* yang menimpa masyarakat Eropa. Demikianlah ia bercerita, langit memberikan tanda-tanda bencana hujan batu turun dari langit dan menghantam orang-orang. Halilintar berkelebat bersahut-sahutan, menghancurkan kota-kota. Sejumlah besar manusia mati di kota tempat ia tinggal. Untuk sebagian, kematian ini disebabkan oleh kejahatan orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen yang telah menjadi antek mereka. Mereka meracuni sungai-sungai yang memberi persediaan air minum bagi penduduk. Langit menunjukkan keadilannya sehingga kejahatan mereka pun dibuka sehingga penduduk mengetahuinya dan beramai-ramai membunuh mereka.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> [http://id.m.wikipedia.org/wiki/Maut\\_Hitam/](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Maut_Hitam/) diakses tanggal 14 Desember 2014

<sup>4</sup> Rene Girard, 1986, *The Scapegoat*, Baltimore: hlm 1-11.

<sup>5</sup> *ibid.*, hlm.2.

<sup>6</sup> *ibid.*,



Secara faktual orang boleh meragukan informasi yang disampaikan oleh Guillaume, namun menurut Girard informasi tersebut menyangkut suatu fakta historis yang benar-benar nyata yakni *the Black Death*. Wabah yang menghabisi wilayah Eropa antara tahun 1349-1350 dan pembunuhan orang-orang Yahudi di zaman wabah pes itu melanda.<sup>7</sup>

Masyarakat pada abad pertengahan demikian takut terhadap bencana atau wabah, sehingga menyebut namanya saja mereka tidak berani. Ketakutan ini membuat mereka tidak berani menghadapi kenyataan tetapi justru mencari siapa yang harus dipersalahkan sampai bencana itu terjadi.<sup>8</sup>

Tulisan Guillaume cocok dengan fenomena tersebut sebab pembunuhan orang Yahudi terjadi sebelum wabah memuncak. Ia tahu wabah itu tidak dapat diasalkan pada satu sebab saja. Seperti orang pada zamannya, ia berpikir ada sebab awal yang jelas mengapa bencana itu terjadi yakni kesalahan orang Yahudi. Dengan demikian orang Yahudi menjadi kambing hitam bagi menyebarnya wabah dan kematian.

Fakta yang ditulis Guillaume memang bisa meragukan secara historis. Dengan membaca teks *Judgmen of King Navarre* orang boleh menyimpulkan bahwa memang ada korban yang dibunuh secara tidak adil dan sewenang-wenang. Orang dapat menyalahkan teks tersebut karena mengklaim bahwa korban itu sungguh bersalah. Dengan membaca teks tersebut orang dapat membedakan mana

---

<sup>7</sup> *ibid.*, hlm.4.

<sup>8</sup> *ibid.*, hlm.2.

yang benar dan yang salah. Pelakunya merasa yakin bahwa kekerasan yang mereka lakukan adalah benar.<sup>9</sup>

Teks *Judgment of King Navarre* mungkin keliru dalam memandang keadaan. Guillaume berpikir secara tradisional, bahwa ada sekelompok orang bersalah yang menyebabkan semuanya itu terjadi. Mereka lalu menjadi kambing hitam bagi bencana yang menimpa. Teks itu benar dalam mengutarakan keyakinannya. Teks Guillaume adalah teks pengejaran dan pembunuhan kambing hitam ditulis dari prespektif sang pelaku. Dalam teks tersebut tak pernah bisa dibuktikan secara historis manakah alasan-alasan yang benar sampai kambing hitam tersebut harus dibunuh. Namun teks tersebut secara historis memaparkan bahwa kambing hitam memang dibunuh. Itulah yang disebut oleh Girard sebagai *stereotypes of persecution* atau stereotip pengejaran<sup>10</sup>

Ketika orang-orang Eropa sedang gelisah akibat melandanya wabah pes, berikut beban berat yang harus ditanggung, mereka kemudian berusaha mencari kambing hitam dalam negeri yang bisa dipersalahkan dan dijadikan sasaran bagi kegelisahan itu. Dalam prakteknya yang menjadi kambing hitam bagi kegelisahan itu adalah masyarakat Yahudi.

Menurut Girard hal tersebut dapat terjadi karena pada umumnya masyarakat sangat rawan dengan krisis dan mudah tersulut kekerasan. Di dalam diri manusia terkandung rivalitas yang sewaktu-waktu bisa memicu balas dendam. Manusia saling bersaing dalam menghasratkan sesuatu. Rivalitas tersebut yang memotivasi manusia untuk bertindak sehingga sering terjadi kekerasan.

---

<sup>9</sup> *ibid.*, hlm.5-7.

<sup>10</sup> *ibid.*, hlm.7.

Apa yang digambarkan oleh Girard tersebut tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di Indonesia pada pertengahan tahun 1960-an. Pada saat itu masyarakat Indonesia sedang mengalami krisis politik. Peristiwa yang dipicu konflik ditubuh Angkatan Darat (AD) dengan serta merta menyeret nama Partai Komunis Indonesia sebagai dalang penculikan dan pembunuhan atas tujuh perwira AD pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965. Setelah peristiwa itu berlangsung, timbulah kegelisahan dan ketidakpastian di masyarakat tentang siapa sebenarnya dalang dari peristiwa itu. Terjadilah serangkaian aksi balas dendam dengan penangkapan serta pembunuhan anggota simpatisan PKI.<sup>11</sup> Belajar dari teori pengejaran Rene Girard, jika di Benua Eropa yang menjadi korban pengkambinghitaman adalah kaum Yahudi, maka di Indonesia salah satu contoh yang menjadi korban seperti itu adalah orang-orang PKI dan para simpatisannya.

Pembunuhan massal terhadap para anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia pada tahun 1965-1966 merupakan salah satu peristiwa kekerasan yang terbesar di dunia. Diperkirakan 500.000-1.000.000 juta orang menjadi korban kebengisan AD. Partai Komunis Indonesia telah lama diidentikkan sebagai partai dengan ideologi komunis yang anti-Tuhan (atheis). Identitas ketidakbertuhanan orang-orang PKI ini kemudian menjadi alat pembenaran bagi kalangan kelompok beragama untuk membunuh, memusnahkan, dan mengucilkan orang-orang yang dituduh PKI. PKI menjadi kambing hitam yang kemudian dijadikan korban atas kekisruhan politik pada saat itu.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> John Roosa, 2008, *Dalih Pembunuhan Massal Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto*, Jakarta: hlm.52.

<sup>12</sup> *ibid.*, hlm.53.

Doktrin yang ditanamkan dalam benak bangsa Indonesia oleh pemerintah Orde Baru adalah bahwa PKI kejam, mereka penganut komunis anti Tuhan. Dalam sejarah yang ditulis versi rezim Suharto PKI dituduh sebagai dalang peristiwa Gerakan 30 September 1965. Versi ini, yang dibangun berdasarkan alasan-alasan yang mudah dilihat, PKI-lah dalang peristiwa gerakan 30 September 1965 dan menjadi satu-satunya pihak yang harus dipersalahkan.

Membahas mengenai peristiwa G30S biasanya versi resmi dan umum berlaku adalah sebagai berikut. Pada tanggal 30 September 1965 melalui Pasukan Cakrabirawa, PKI telah melancarkan kudeta dengan cara membunuh 7 petinggi AD di Jakarta. Begitu kejamnya orang-orang PKI itu sehingga enam orang jendral dan seorang Kapten menjadi korban. Kekejaman PKI berlanjut di Lubang Buaya dengan jalan menyayat-nyayat tubuh para jendral. Sekelompok perempuan yang tergabung dalam Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) bahkan memotong alat-alat vital para jendral sambil menari-nari di tengah orgi yang disebut “pesta harum bunga”. Mata dari sebagian korban juga dicungkil.<sup>13</sup>

PKI dipandang sebagai dalang atas peristiwa keji tersebut sehingga sudah sepantasnya jika mereka dan ratusan ribu anggotanya dimanapun berada dikejar dan dibunuh secara beramai-ramai. Pantas pula peristiwa yang terjadi pada 30 September 1965 itu disebut “G30S/PKI” dengan penekanan PKI merupakan pelaku utama. PKI juga layak ditumpas karena sebelumnya telah melakukan

---

<sup>13</sup> Dr. Baskara T. Wardaya., SJ, 2006, *Bung Karno Menggugat! Dari Marhaen, CIA, Pembantaian Massal '65 hingga G30S*, Yogyakarta: hlm.165.

pemberontakan pada 1948 di Madiun, dan ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi Komunis yang ateis.<sup>14</sup>

Masih terdapat buku-buku yang memanipulasi fakta mengenai G30S dan pro terhadap rezim Suharto. Padahal dalam penelitian-penelitian selanjutnya tidak terbukti bahwa PKI yang menjadi otak maupun dalang pelaku peristiwa Gerakan 30 September 1965. Sebagai contoh, salah satunya yaitu penelitian John Roosa yang diterbitkan ke dalam buku *Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto* (2008). Buku ini menjelaskan bahwa Gerakan 30 September merupakan dalih pembunuhan massal terhadap PKI dan anggota sayap kirinya serta kudeta Suharto untuk melengserkan kekuasaan Sukarno. Selain itu seorang ahli sejarah Dr. Baskara T.Wardaya, SJ mengungkapkan bahwa PKI adalah organisasi sipil, sementara itu tokoh-tokoh yang terlibat dalam gerakan yang menamakan diri sebagai Gerakan Tigapuluh September yakni Letkol Untung, Kolonel Abdul Latief dan Brigjen Soepardjo justru merupakan personel-personel militer AD. Tidak ada indikasi bahwa PKI memiliki kekuatan besar yang dapat mempengaruhi para perwira AD sehingga mereka tunduk dan mau melaksanakan rencana PKI untuk melawan kesatuannya sendiri.

Menjadi tampak yang dikatakan Girard di atas bahwa masyarakat rawan dengan krisis dan mudah tersulut kekerasan. Hal tersebut tidak hanya berlaku pada kasus pembantaian orang-orang Yahudi akibat wabah *Black Death* di Eropa, namun juga kasus pembantaian massal terhadap PKI di Indonesia. Penelitian ini

---

<sup>14</sup> *ibid.*, hlm.166.

merupakan upaya penulisan kembali Tragedi 1965 menggunakan teori Kambing Hitam Rene Girard.

## **B. Perumusan Masalah**

Dalam penulisan skripsi ini batasan masalah ditentukan agar penulisan tidak meluas di luar topik yang ditentukan. Permasalahan yang akan ditulis ialah mengenai tragedi pembunuhan massal anggota PKI beserta simpatisannya tahun 1965-1966 dengan menggunakan pendekatan teori kambing hitam Rene Girard. Dengan demikian beberapa permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana situasi sosial, ekonomi dan politik di Indonesia pada tahun 1950-1965?
2. Bagaimana sikap pemerintah Orde Baru dalam menafsir dan mengambil tindakan terhadap Tragedi 1965?
3. Bagaimana teori Kambing Hitam dapat digunakan untuk menganalisis peristiwa tersebut?

## **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan perumusan masalah, pembatasan masalah dibuat agar perumusan masalah tidak meluas. Batasan-batasan yang digunakan adalah:

1. Peristiwa Gerakan 30 September di Jakarta pada tahun 1965.
2. Pembunuhan massal orang-orang PKI pada tahun 1965-1966 di Indonesia khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur.

3. Relevansi teori kambing hitam Rene Girard untuk menganalisis tragedi 1965 di Indonesia.

#### **D. Tujuan Penulisan**

Hasil dari penulisan mengenai peristiwa Gerakan 30 September 1965 diharapkan dapat mencapai beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Mampu menguraikan sejauh mana teori kambing hitam relevan dan dapat dipertanggungjawabkan
2. Menguraikan serta menjelaskan bagaimana sikap pemerintah Orde Baru menafsir dan mengambil tindakan terhadap Tragedi 1965 .
3. Mampu menjelaskan bagaimana tragedi 1965 dapat dilihat dengan latar belakang teori Girard tentang pengejaran terhadap kambing hitam.

#### **E. Manfaat Penulisan**

1. Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk bidang sejarah supaya digunakan sebagai salah satu bahan referensi untuk mengetahui sejarah kalam bangsa Indonesia secara khusus peristiwa 30 September 1965. Selain itu bagi sejarawan, skripsi ini dapat memberikan sudut pandang yang baru dari penulisan yang ada mengenai topik yang sama.

2. Praktis

Memberikan informasi dan pemahaman kepada pembaca skripsi ini sehingga dapat memberikan sudut pandang yang baru dari penulisan

yang ada mengenai topik yang sama. Selain itu, diharapkan tidak hanya sekedar menambah pengetahuan mengenai tragedi 1965 namun dapat menginspirasi bagi para pembacanya sehingga mampu memperkuat semangat nasionalisme.

## **F. Kajian Pustaka**

Banyak sekali buku-buku yang membahas mengenai peristiwa G30S dengan menitik beratkan pada persoalan siapakah dalang dari peristiwa tersebut, menyajikan fakta-fakta mengenai pelaku dan orang-orang yang terlibat, namun sejauh ini belum ada kajian tentang Tragedi '65 yang menggunakan sudut pandang teori kambing hitam Rene Girard. Itulah faktor yang mendorong untuk melakukan penulisan skripsi ini. Beberapa buku yang digunakan sebagai menjadi acuan dan pembanding dalam penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut:

*Palu Arit Di Ladang Tebu: Sejarah pembantaian massal yang terlupakan (1965-1966)*. Buku ini ditulis oleh Hermawan Sulistyono, diterbitkan oleh KPG (Kepustakaan Populer Gramedia) bekerjasama dengan Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation tahun 2000. Buku ini merupakan disertasi pengarang *The Forgotten Years: The Missing History of Indonesia's Mass Slaughter (Jombang-Kediri 1965)* yang kemudian diterjemahkan dan diterbitkan menjadi buku. Kajian mendalam tentang pembantaian sejumlah lelaki, wanita, anak-anak, yang dituduh sebagai anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia, khususnya di Jawa Timur pada awal kekuasaan Suharto. Yang membedakan



antara karya tulis Hermawan Sulistyو dengan penelitian ini adalah buku ini menelusuri berbagai variabel sosial secara horizontal. Dengan memfokuskan pada lapisan masyarakat bawah yakni konteks struktural dan konteks kultural, yang turut menentukan terjadinya pembantaian massal di Jombang dan Kediri, Jawa Timur pada periode 1965-1966. Sedangkan penelitian ini melihat tragedi pembunuhan massal 1965 dari sudut pandang korban dengan teori kambing hitam mengapa mereka dipersalahkan.

Buku *Economist With Guns*, karya Bradley Simpson diterbitkan oleh Gramedia tahun 2011. Buku ini menjelaskan mengenai peran Amerika Serikat dalam berbagai aksi-aksi politik maupun ekonomi di Indonesia. Buku ini juga menjelaskan upaya AS dalam mengubah arah politik Indonesia menjadi antikomunis hingga munculnya Orde Baru yang di dukung oleh Amerika Serikat.

Buku *Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto* karya John Roosa diterbitkan oleh Institut Sejarah Sosial Indonesia dan Hasta Mitra pada tahun 2008. Dari sudut pandang penulisnya Gerakan 30 September merupakan dalih bagi pembunuhan massal terhadap PKI dan anggota sayap kirinya serta aksi kudeta Suharto untuk melengserkan kekuasaan Sukarno. Perbedaan antara penulisan skripsi ini dengan karya tulis John Roosa adalah bahwa buku ini menjelaskan Gerakan 30 September 1965 sebagai kudeta yang dilakukan Suharto. Di dalamnya tidak terdapat penjelasan lebih lanjut dan mendalam mengenai peristiwa pembantaian massal 1965-1966.

Buku *Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia: Latar Belakang, Aksi, dan Penumpasannya* yang diterbitkan oleh Sekertaris

Negara Republik Indonesia tahun 1994. Merupakan cerminan sikap resmi tentang bagaimana institusi militer pada masa pemerintahan Suharto menafsir dan mengambil tindakan terhadap Gerakan 30 September. Semua cerita, skenario, dan juga pandangan-pandangan dalam melihat peristiwa itu mengacu pada cerita satu-padu bahwa PKI merupakan dalang dari peristiwa Gerakan 30 September. Buku ini merupakan salah satu contoh pengkambinghitaman PKI dalam bentuk narasi historis pada saat rezim Suharto berkuasa. Yang membedakan adalah jika dalam buku ini menarasikan PKI sebagai dalang peristiwa G30S dengan runut, penelitian ini mengalisa bagaimana pengkambinghitaman itu terjadi.

Buku *Kambing Hitam Teori Rene Girard* karya Sindhunata, SJ mengupas teori Kambing Hitam karya Rene Girard. Dalam buku ini Sindhunata membagi teori Rene Girard menjadi tiga fase perkembangan. Pertama, teori hasrat segitiga (mimesis). Kedua, teori kambing hitam berdasarkan penelusuran atas sejarah, mitos, ritus pengorbanan agama arkais dan tragedi besar Yunani zaman antik. Ketiga, interpretasi alkitab terhadap kristianitas. Pada bagian akhir buku ini Sindhunata memberikan ekskursus mengenai pengkambinghitaman etnis Tionghoa tahun 1998. Ekskursus tersebut bukanlah studi yang mendalam tetapi hendak menunjukkan bahwa teori Rene Girard dapat digunakan untuk menganalisa bahwa mimesis dan kambing hitam memang ada. Buku ini digunakan dalam penelitian untuk memahami teori dan pemikiran Rene Girard.

Buku lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Bung Karno Menggugat! Dari Marhaen, CIA, Pembantaian Massal hingga G30S*. Karya Dr. Baskara T. Wardaya, SJ yang diterbitkan oleh Galang Press tahun 2006. Pokok

bahasan yang menjadi tema utama di dalam buku ini di antaranya adalah perbandingan pemikiran-pemikiran Sukarno muda dan Sukarno Tua, Sukarno dalam kaitannya dengan tragedi tahun 1965, corak kepemimpinan Sukarno dibandingkan dengan kepemimpinan Suharto, serta keterlibatan pihak lain dalam tragedi tahun 1965. Yang membedakan penelitian ini dengan karya tulis Dr. Baskara T. Wardaya, SJ ialah buku ini banyak memberi gambaran keterlibatan pihak asing menjelang tragedi '65, tetapi tidak menjelaskan secara mendalam mengenai peristiwa pembunuhan massal 1965-1966.

Dari semua buku yang digunakan sebagai acuan dalam penulisan skripsi ini, baik karya Hermawan Sulisty, John Roosa, Bradley Simpson dan Dr. Baskara T. Wardaya tidak menjelaskan secara eksplisit pengkambinghitaman dan pengejaran orang-orang PKI menggunakan teori Rene Girard. Artinya belum ada sejarawan dan peneliti di Indonesia yang menerangkan pembunuhan massal 1965 menggunakan kerangka berpikir stigmatisasi dan pengejaran model Rene Girard.

Selain melihat buku-buku yang memiliki kesamaan tema, dalam penelitian ini juga dilihat skripsi-skripsi dengan tema yang sama. Dari pencarian ditemukan dua buah skripsi yang membahas tentang PKI.

Skripsi pertama adalah karya Luh Putu Ayu Riska Widarmiati dari Prodi Ilmu Sejarah Sanata Dharma dengan judul "Latar Belakang Suksesnya PKI di Indonesia Tahun 1955-1962". Skripsi ini merupakan studi kasus di balik keberhasilan PKI pada pemilu tahun 1955. Pemilu tahun 1955 menjadi gerbang utama PKI memperoleh kemenangan. Skripsi ini menjelaskan proses bagaimana PKI meraih kesuksesannya pada tahun 1962. Penelitian ini tentu saja berbeda

dengan skripsi karya Luh Putu Ayu Riska Widarmiati. Ruang lingkup pembahasannya berbeda, penelitian ini membahas mengenai pengakambyhitaman PKI dan simpatismnya pada tahun 1965-1966.

Skripsi kedua adalah karya Lidwina Wijadmi dari Prodi Pendidikan Sejarah Sanata Dharma dengan judul “Perkembangan PKI Pemberontakan dan Pergantian Pemerintahan RI Tahun 1950-1966”. Skripsi ini juga membahas tema yang sama tentang PKI. Namun skripsi ini lebih menyoroti tentang perkembangan PKI tahun 1950-1965, dan menjelaskan mengenai peristiwa Gerakan 30 September tahun 1965 menggunakan perspektif PKI sebagai pelaku pemberontakan hingga terjadinya pergantian pemerintah RI tahun 1966. Perbedaan antara penelitian ini dengan skripsi karya Lidwina Wijadmi terletak pada pembahasannya. Bila penelitian ini menempatkan PKI sebagai korban pengakambyhitaman karena dituduh sebagai dalang G30S, skripsi karya Lidwina Wijadmi menjelaskan bahwa PKI pelaku utama G30S dalam upaya untuk merebut kekuasaan.

## **G. Landasan Teori**

Sebelum masuk pada pembahasan lebih lanjut akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai landasan teori sebagai kerangka berpikir yang digunakan dalam penulisan skripsi ini. Teori yang digunakan adalah teori Kambing Hitam Rene Girard. Teori kambing hitam merupakan fase kedua teori Girard. Menurut Girard dalam masyarakat ini bertahta rivalitas tiada habisnya, yang sewaktu-waktu bisa menyulut kekerasan. Dalam teorinya Girard mengatakan bahwa manusia itu saling

bersaing dalam menghasratkan sesuatu. Rivalitas itulah yang memotivasi manusia untuk bertindak, sehingga sering memicu konflik hingga berujung pada kekerasan.

Menurut Girard kekerasan berujung pada pengejaran yang bersifat kolektif. Pengejaran itu dilakukan oleh sekelompok anggota masyarakat yang serentak dan beramai-ramai melakukan pembunuhan. Seperti yang terjadi pada pembunuhan orang-orang Yahudi pada peristiwa *Black Death*. Kekerasan yang terjadi dalam pengejaran itu diakui sebagai perbuatan yang sah karena distimulasikan oleh opini publik yang ekstrim dan meruncing dalam menyetujui perbuatan itu.<sup>15</sup>

Pengejaran demikian biasanya terjadi pada saat situasi krisis yang melumpuhkan institusi-institusi sosial. Sebagai akibatnya terbuka peluang besar bagi pembentukan gerakan kerumunan massa yang spontan dan destruktif. Sering gerakan ini segera menggantikan peran institusi sosial yang telah memudar. Penyebab dari krisis macam ini bisa eksternal dan internal. Penyebab eksternal misalnya adalah menjangkitnya wabah, bencana kekeringan atau kelaparan. Sedang penyebab internal, misalnya adalah kekacauan politik dan konflik agama. Apapun pemicunya eksternal atau internal pengalaman dalam krisis tersebut selalu sama. Tatanan hierarkis sosial menjadi berantakan, hukum melupuh, dan menghilangkan perbedaan derajat sosial.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Girard, Rene. *op.cit.*, hlm. 12.

<sup>16</sup> *ibid.*, hlm.13-14.

Rene Girard membagi teori kambing hitam ke dalam tiga stereotip. *Pertama*, hancurnya diferensiasi sosial yang melahirkan uniformitas yang kemudian menyulut terjadinya resiprositas kekerasan dan balas dendam. *Kedua*, krisis distingsi mengharuskan adanya kambing hitam yang harus dinyatakan bersalah sebagai penyebab dari krisis yang mereka alami. *Ketiga*, korban adalah suatu kelompok masyarakat yang seakan ditakdirkan untuk menjadi korban, terlepas dari apakah mereka bersalah atau tidak bersalah, biasanya yang dijadikan kambing hitam adalah kelompok minoritas etnis atau religius.<sup>17</sup>

Krisis di dalam masyarakat mengakibatkan krisis distingsi. Krisis distingsi yang makin memperhebat kekacauan ini membuat masyarakat mencari korban yang dituduh telah membuat kesalahan. Korban ditunjuk bukan karena bersalah, tetapi karena pada mereka telah melekat stigma korban yang dapat dipersalahkan. Girard sampai pada kesimpulan bahwa “*violence is the heart and secret soul of the sacred*”.<sup>18</sup>

Krisis dalam masyarakat telah mengakibatkan krisis distingsi. Krisis distingsi yang makin memperhebat kekacauan ini membuat masyarakat mencari korban yang dituduh membuat kesalahan. Mereka yang dijadikan kambing hitam bukan karena kesalahan yang telah dituduhkan. Kaum minoritas religius atau etnis sering dijadikan korban kambing hitam. Korban kambing hitam itu harus lemah dan minoritas. Jika kuat tentu konflik tidak akan berakhir. Ciri-ciri dari mekanisme kambing hitam adalah terlepas korban tersebut bersalah atau tidak,

---

<sup>17</sup> *ibid.*, hlm. 14-18.

<sup>18</sup> Rene Girard, 1977. *Violence and the Sacred*. London: hlm.31.

tetapi upaya membesar-besarkan dengan menambahkan kesalahan sehingga semua kekacauan atau bencana yang terjadi dapat dilimpahkan padanya.

Pada mekanisme kambing hitam Girard telah melihat bahwa setiap hasrat mengandung potensi konflik karena sifat dan watak mimesisnya. Pada fase kedua ini, ia meneliti sebab-akibat rivalitas dari dua pihak yang mempunyai hasrat yang sama. Jika sebelumnya ia melihat rivalitas itu sebatas antara dua individu, pada teori kambing hitam rivalitas diperluas hingga mengenai relasi-relasi sosial dalam masyarakat. Girard menemukan bahwa mekanisme kambing hitam (*scapegoat*) dapat membatasi kekerasan dengan mengalihkannya untuk menghindari kekerasan yang lebih hebat lagi. Inti pokok gagasan Rene Girard adalah demikian, setiap hasrat mengandung potensi konflik karena watak mimesis. Diktator mimesis hasrat tiru meniru yang memperbudak kebebasan manusia dengan kecemburuan dan kebencian telah menghasilkan rivalitas. Rivalitas menghasilkan kekerasan. Kekerasan menghasilkan mekanisme kambing hitam.<sup>19</sup>

Girard juga mengemukakan pengertian tentang kultur. Kultur ada karena terdapat distingsi dan perbedaan dalam masyarakat. Komponen yang menyusun suatu kultur adalah perasaan dan pikiran bahwa setiap orang berbeda satu dari yang lainnya. Kultur suatu masyarakat di manapun sangat rawan dengan krisis dan mudah tersulut kekerasan, karena di dalam diri manusia terkandung watak mimesis (hasrat tiru-meniru yang memperbudak kebebasan manusia dengan kecemburuan dan kebencian) sehingga mencetuskan rivalitas. Manusia saling

---

<sup>19</sup> *ibid.*, hlm. 106.

bersaing dalam menghasratkan sesuatu. Rivalitas tersebut memotivasi manusia untuk bertindak sehingga sering terjadi kekerasan.

Kerapuhan kultur tersebut yang diperlihatkan oleh Girard dalam analisisnya tentang pengejaran dan penganiayaan terhadap kelompok yang terstigma menjadi korban. Sama halnya dengan yang terjadi di Indonesia menjelang tahun 1965. Kerapuhan kultur terjadi saat krisis melumpuhkan instansi sosial akibat perebutan kekuasaan. Rivalitas tersebut mencetuskan G30S. Suharto melancarkan kudeta untuk menjatuhkan kekuasaan Presiden Sukarno. Kemudian terjadilah kekerasan pada peristiwa pembunuhan massal 1965-1966. PKI dijadikan kambing hitam karena dituduh sebagai dalang G30S. Akibatnya terbukalah lebar peluang bagi pembentukan kerumunan massa yang spontan dan destruktif. Pengejaran dilakukan oleh sekelompok anggota masyarakat secara serentak dan beramai-ramai, melakukan pembantaian massal terhadap anggota PKI. Mereka dikambinghitamkan sebagai dalih untuk menjatuhkan kekuasaan Sukarno pada kala itu.

Jika dilihat dari perspektif aspek teologis teori ini dapat digunakan untuk melihat ritual pengorbanan hewan sebagai tumbal atau sesaji pada jaman arkaik (primitif) yang berfungsi sebagai peristiwa penyelamatan untuk meniadakan kekerasan agar suatu masyarakat berada dalam keadaan tenang dan damai. Pada era modern ini mekanisme kambing hitam telah berubah, yang menjadi korban atau dikorbankan adalah kelompok masyarakat minoritas, sebagai kambing hitam dalam penyelesaian suatu konflik.



Menurut Sindhunata, teori Kambing Hitam Rene Girard memberikan perspektif baru hubungan agama dan kekerasan. Kata Rene Girard “*Religions is always against violence*”. Kekerasan terjadi karena mimesis yang terjadi di wilayah agama. Kultur bahkan juga agama adalah institusi manusia yang dihantui rivalitas dan kekerasan yang bermuara pada pembunuhan kambing hitam.<sup>20</sup> Girard mengatakan akan datang saat dimana agama tidak mampu lagi meredam kekerasan. Itulah yang terjadi di Indonesia saat krisis terjadi menjelang tahun 1965 menyebabkan konflik yang memicu kekerasan pada tragedi berdarah 1965. Rekayasa, isu-isu agama dijadikan alat propaganda pemicu kekerasan akibatnya pembunuhan dengan skala besar terjadi. Permasalahan tersebut yang kiranya disoroti dalam penelitian ini.

## H. Metode Penelitian

Langkah pertama penulisan skripsi ini adalah pengumpulan data. Adapun cara atau teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik studi pustaka. Studi pustaka merupakan bentuk pengumpulan data yang bersumber dari telaah buku-buku, literature dan bahan bacaan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Metode penelitian dilakukan melalui studi pustaka di Perpustakaan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta serta Perpustakaan lain di D.I. Yogyakarta untuk mendapatkan data yang kiranya sesuai dengan penulisan skripsi ini. Setelah pengumpulan data kemudian dilakukan kritik sumber. Dalam penulisan sejarah kritik sumber bertujuan untuk menghindari

---

<sup>20</sup> Sindhunata, *op.cit.*, hlm. 54.

adanya kepalsuan suatu sumber. Salah satu cara untuk mendapatkan sumber adalah kritik intern dengan memperbandingkan sumber.

Selanjutnya dilakukan analisis data. Teknik analisis dalam penelitian ini yaitu analisis data dengan tidak menggunakan data statistik akan tetapi penelitian menggunakan data dari kepustakaan dan internet, karena penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Analisis merupakan tahap yang paling penting dan menentukan dalam suatu penelitian. Hasil analisis akan menunjukkan tingkat keberhasilan suatu penelitian. Analisis data dalam penulisan ini lebih menekankan pada pengkambinghitaman dan pembunuhan massal PKI beserta pengikutnya pada tahun 1965-1966 menggunakan pendekatan teori kambing hitam Rene Girard. Langkah yang terakhir adalah penulisan sejarah. Penulisan sejarah dilakukan secara kronologis dari peristiwa yang terjadi.

## **I. Sistematika Penulisan**

Bab I merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, teori dan metode penelitian, tinjauan pustaka, serta sistematika penulisan.

Bab II menguraikan situasi sosial, ekonomi dan politik di Indonesia tahun 1950-1965, peristiwa G30S dan pembantaian massal 1966.

Bab III menguraikan sikap pemerintah Orde Baru dalam menafsir dan mengambil tindakan terhadap Tragedi 1965.

Bab IV analisa Tragedi 1965 dengan menggunakan sudut pandang teori kambing hitam Rene Girard.

Bab V adalah penutup. Dalam bab ini berisikan kesimpulan dari keseluruhan tulisan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan yang diajukan.



## BAB II

### SITUASI POLITIK DI INDONESIA TAHUN 1950-1966

#### A. Gerakan 30 September 1965

Menjelang tahun 1965 ketegangan dan konflik mewarnai kehidupan sosial dan politik di Indonesia. Setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda pada 1949, Indonesia mencoba menerapkan sistem pemerintahan liberal antara tahun 1950-1959. Sistem pemerintahan liberal merupakan pemerintahan yang dijalankan oleh Perdana Menteri, sementara Presiden hanya merupakan simbol nasional. Tetapi dalam perkembangannya sistem pemerintahan tersebut tidak berjalan dengan baik. Tidak ada partai yang mampu memerintah dengan lama tanpa dijatuhkan oleh partai lain. Pemerintahan terlama bertahan tidak lebih dari dua tahun. Salah satu penyebabnya adalah tidak adanya partai mayoritas di Parlemen. Empat partai besar di Indonesia seperti PNI (Partai Nasionalis *Indonesia*), Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia), NU (Nahdathul Ulama), dan PKI (Partai Komunis Indonesia) memiliki jumlah kursi yang hampir sama di Parlemen.<sup>21</sup>

Selama kurun waktu 1950-1959 terjadi beberapa kali pergantian kabinet sehingga menyebabkan kondisi politik tidak stabil. Karena sering terjadi pergantian kabinet, pembangunan negara tidak berjalan dengan baik. Masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan golongannya daripada

---

<sup>21</sup> Soegiarso Soerojo, 1998, *Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai : G30S/PKI dan Peran Bung Karno*, Jakarta: hlm. 135.

kepentingan negara. Kegagalan sistem pemerintahan liberal mendorong Sukarno yang didukung oleh tentara untuk menerapkan sistem pemerintahan baru yang disebut Demokrasi Terpimpin pada tahun 1959.

Selain kegagalan sistem pemerintahan liberal, terjadinya perang saudara yang dikenal dengan pemberontakan PRRI pada tahun 1958 juga menjadi faktor yang mendorong Sukarno untuk mengganti sistem tersebut dengan sistem yang baru. Sebuah perang yang bernuansa kekerasan menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Perang tersebut terjadi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Perang ini dipicu karena tidak adanya keseimbangan pembangunan antara Pulau Jawa dan luar Jawa. Selama tahun 1950-an pembangunan lebih dipusatkan di daerah Jawa terutama Jakarta, sementara intensitas pembangunan daerah luar Jawa sangat rendah.<sup>22</sup>

Pemerintah Amerika Serikat rupanya ikut campur tangan dalam membantu para perwira militer di daerah yang merasa terasing dari sentralisasi kekayaan dan kekuasaan di Jawa serta sikap abai pemerintah terhadap perekonomian di luar Jawa. Pada Februari tahun 1958 para perwira yang membelot tersebut membentuk Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan mengobarkan perang saudara yang singkat namun hebat. Sebagai reaksi, Sukarno memberlakukan hukum darurat perang dengan dukungan yang luas dari para perwira di Jawa dan mengganti sistem pemerintahan liberal dengan sebuah sistem yang ia sebut Demokrasi Terpimpin serta lebih memusatkan kekuasaan di Jawa. Di bawah komando Jendral Nasution, tentara Indonesia yang setia terhadap Sukarno

---

<sup>22</sup> Syamdani, 2008, *PPRI Pemberontakan atau Bukan?*, Yogyakarta: hlm.39-84.

menumpas pemberontakan PRRI pada bulan Juni 1958, meski unit-unit pemberontak yang terpencil terus menentang pemerintahan pusat di Jakarta selama kurang lebih dua tahun.<sup>23</sup>

Partai-partai anti-Komunis seperti Masyumi dan PNI yang mendukung pemberontakan kehilangan sebagian besar kekuatan mereka. Konsekuensi politik dari perang saudara yang telah terjadi menyebabkan Indonesia tidak lagi mempunyai organisasi yang dapat mengimbangi PKI maupun militer. Keadaan tersebut yang memberi dasar bagi pertumpahan darah yang mengerikan pada akhir tahun 1965. Angkatan Darat memperkuat pengaruh politiknya dengan menggunakan kekuatan di bawah hukum darurat perang untuk mendudukkan dirinya dalam kementerian-kementerian yang penting. Suatu gerak yang memiliki implikasi yang amat menentukan bagi strategi pembangunan Indonesia.<sup>24</sup>

Dengan menerapkan sistem Demokrasi Terpimpin Sukarno secara perlahan cenderung membawa Indonesia ke “kiri”. Di dalam negeri ia menerapkan kebijakan Nasakom untuk menggabungkan tiga kelompok sosial politik yaitu Nasionalis, Agama dan Komunis sebagai akar seluruh kekuatan politik. Dalam konsepnya Sukarno bercita-cita ketiga kelompok tersebut bersatu menjadi kekuatan progresif revolusioner demi memajukan Indonesia. Namun dalam prakteknya Nasakom menghasilkan situasi yang kacau.

Pemilu tahun 1955 memunculkan PKI sebagai partai terbesar keempat di Indonesia dengan 16,4 persen suara. Antara tahun 1954-1959 anggota PKI

---

<sup>23</sup> Bradley R.Simpson, 2008, *Economists with Guns*, Jakarta: hlm.46.

<sup>24</sup> *ibid.*, hlm.48-49.

bertambah dari 200.000 menjadi lebih dari 1,5 juta dengan anggota organisasi pemuda, organisasi perempuan, organisasi buruh serta anggota lain yang terafiliasi.<sup>25</sup> Keberhasilan PKI menimbulkan konflik bukan saja di lingkungan lawan dan kawan separtai tetapi juga di lingkungan militer. PKI dan AD sama-sama memiliki kepentingan untuk bisa mendominasi politik nasional seluruhnya. Begitu pula dengan Sukarno yang memiliki kepentingan membentuk negara dengan ideologinya.

Presiden Sukarno semakin kuat berpegang prinsip non-blok dan politik bebas aktif dalam hubungan luar negeri. Ia pun rajin membina hubungan dengan negara-negara Blok Timur yang merupakan lawan Amerika.<sup>26</sup> Secara umum kebijakan luar negeri Indonesia ditetapkan untuk melakukan manuver di antara para pemain besar yaitu Amerika Serikat, Uni Soviet dan RRC. Hal ini menyebabkan bertambah luasnya ruang gerak PKI yang lebih dekat dengan Beijing, serta semakin besarnya perhatian Amerika Serikat terhadap peristiwa-peristiwa dalam negeri Indonesia untuk mencegah meluasnya pengaruh komunis di Indonesia.

Di kancah internasional Sukarno mengarahkan Indonesia untuk menjadi negara baru merdeka yang berbeda dari Blok Barat dan Blok Komunis. Tetapi dalam kenyataanya Indonesia cenderung memihak Blok Komunis khususnya ke Republik Rakyat Cina (RRC) setelah terjadi perpecahan ideologis antara Uni Soviet dan RRC. Indonesia berjuang menentang kekuatan Nekolim

---

<sup>25</sup> *ibid.*, hlm.43

<sup>26</sup> T. Wardaya, Baskara, *op.cit.*, hlm.85.

(Neokolonialisme dan Imperialisme). Sebagai contoh Indonesia berusaha membebaskan Irian Barat dari kekuasaan Belanda serta melawan Malaysia yang dinilai sebagai negara boneka buatan Inggris.<sup>27</sup>

Perkembangan selanjutnya yang semakin menguntungkan PKI terjadi tahun 1960 ketika Presiden Sukarno melakukan pembaharuan struktur pemerintah menurut ketentuan Manipol. Sesuai dengan program umum Manipol maka dibentuklah badan-badan baru seperti MPRS, DPA, Front Nasional. Front Nasional bertujuan sebagai penggerak masyarakat secara demokratis. Presiden Sukarno berjanji akan membentuk kabinet gotong royong yang memasukkan PKI sebagai anggotanya sehingga secara politik PKI mendapat perlindungan.

Posisi PKI semakin kuat dengan dibentuknya Kabinet Dwikora pada tanggal 27 Agustus 1964 yang di dalamnya duduk beberapa orang tokoh PKI sebagai Menteri Koordinator (Menko) dan Menteri Pembentukan Komando Tertinggi. Pada tahun 1965 situasi politik Indonesia semakin memanas. Hubungan presiden Sukarno dengan Angkatan Darat semakin tegang karena perbedaan sikap mengenai PKI. Eksistensi PKI yang semakin mengawatirkan membuat semua kekuatan sosial politik memusuhinya, terlebih lagi Angkatan Darat.

Dampak lain dari kegagalan sistem pemerintahan yang menyebabkan pembangunan negara tidak berjalan dengan baik berimbas pula dalam bidang perekonomian. Ekonomi Indonesia merosot dengan cepat. Selama delapan tahun di bawah Demokrasi Terpimpin, rata-rata inflasi melonjak dari dua digit menjadi tiga digit, bahkan mencapai 650 persen pada tahun 1965. Meski demikian,

---

<sup>27</sup> Hermawan Sulisty, 2000, *Palu Arit di Ladang Tebu*, Jakarta: hlm.16



Soekarno tetap bertahan dengan menyatakan bahwa inflasi bukanlah hal yang berbahaya kecuali bila ada kelaparan dan kemiskinan.<sup>28</sup>

Kondisi ekonomi yang memburuk memaksa pemerintah mengambil keputusan untuk melakukan sanering, yaitu pemotongan nilai nominal mata uang rupiah dari Rp.1000 menjadi Rp.1. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memecahkan persoalan-persoalan sebagai berikut. Pertama, antara 1954 hingga 1959 defisit anggaran, suplai uang dan biaya hidup meningkat hampir tiga kali lipat. Kedua, pada 1962 defisit pemerintah dan suplai uang harga-harga melonjak, nilai tukar resmi jauh lebih rendah dibandingkan nilai tukar pasar. Biaya hidup sehari-hari pada 1957 sekitar Rp.100 setara dengan Rp.348 menjelang akhir tahun 1960, melonjak menjadi Rp.16.000 pada akhir tahun 1965. Akibat situasi ini orang-orang lebih suka menyimpan barang, khususnya bahan-bahan kebutuhan pokok daripada uang.<sup>29</sup>

Menjelang akhir tahun 1965 total utang luar negeri mencapai 2,4 miliar dollar AS, sementara pendapatan ekspor nonmigas tercatat sebesar 424 juta dolar AS. Untuk biaya impor dan rehabilitasi pemerintah harus membayar paling tidak 500-600 miliar dolar AS. Untuk mengatasi situasi ini, pemerintah mengadakan pinjaman baru. Cicilan utang dan bunga yang harus dibayar pada tahun 1966 sebesar 640 juta dollar AS, sementara pendapatan nasional hanya Rp.400 juta dolar AS.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> *ibid.*, hlm 18.

<sup>29</sup> *ibid.*, hlm 19.

<sup>30</sup> *ibid.*, hlm 21.

Ekonomi biaya tinggi akibat inefisiensi dan korupsi di birokrasi banyak berperan terhadap mundurnya perekonomian. Faktor yang memperburuk adalah impor yang meningkat dari 499 juta dollar AS pada tahun 1955 menjadi 664 juta dollar AS pada tahun 1960, serta 1.550 juta dollar AS pada tahun 1965. Impor tidak turun karena sebagian besar pembayaran berasal dari utang luar negeri. Antara tahun 1956 sampai 1961 penjualan beras, kapas, tembakau, dan gandum ke Indonesia di bawah PL 480 (pangan untuk perdamaian atau *food for peace*) mencapai total 228 juta dollar AS. Dalam kurun waktu yang sama perencanaan yang buruk dan situasi ekonomi Indonesia yang terus merosot mengubah Indonesia dari negara pengeksport beras menjadi salah satu negara importir beras terbesar. Beras luar negeri dijual dengan harga lebih murah daripada produksi dalam negeri. Inflasi yang sangat cepat menyebabkan impor pupuk dan peralatan pertanian dari AS yang disebut sebagai penggerak modernisasi pertanian menjadi sangat mahal.<sup>31</sup>

Rencana Delapan Tahun Sukarno untuk pembangunan ekonomi Indonesia dicanangkan pada Agustus 1960. Rencana Delapan Tahun adalah pernyataan pandangan Sukarno yang paling konkrit mengenai Ekonomi Terpimpin. Tahun 1960 Indonesia menyediakan kurang lebih setengah dari anggaran nasional untuk pembelanjaan pertahanan. Jumlah tersebut akan lebih banyak lagi jika menghitung dana dari perusahaan-perusahaan yang dikontrol oleh militer, korupsi dan penyelundupan. Banyaknya jumlah pembiayaan tersebut menghambat upaya

---

<sup>31</sup> R. Simpson, Bradley, *op.cit.*, hlm. 67-68.

serius pembangunan ekonomi serta memperkuat posisi militer untuk mengelakkan pertentangan terhadap hak prerogatif bujeter dan posisi ekonominya.<sup>32</sup>

Kondisi begitu buruk sehingga Sukarno gagal menjalankan kebijakan ekonomi. Situasi ini mengundang keprihatinan di kalangan kaum intelektual serta kalangan militer khususnya para perwira AD. Ketidakmampuan Sukarno untuk mengatasi masalah ekonomi justru menjadi berkah terselubung bagi “politik kiri”. Hal tersebut dijadikan senjata untuk menyalahkan para kapitalis bahwa kemunduran ekonomi dalam negeri merupakan dampak imperialisme Barat.

Tahun 1965 merupakan puncak krisis politik di Indonesia. Diawali dengan hancurnya BPS (Barisan Pendukung Sukarno), ketegangan hubungan antara Sukarno dengan Angkatan Darat berkaitan dengan PKI serta keputusan presiden Sukarno untuk keluar dari keanggotan PBB. Keluarnya Indonesia dari PBB menimbulkan spekulasi bahwa Indonesia akan semakin dekat dengan RRC. Bahkan disebutkan kemungkinan Indonesia mendapatkan senjata nuklir dari RRC.

Situasi Indonesia semakin buruk oleh menurunnya ekspor dan besarnya pinjaman luar negeri untuk keperluan tentara. Namun yang paling berpengaruh terhadap gejolak politik dalam negeri adalah kesehatan presiden Sukarno. Kabar bahwa kesehatan presiden Sukarno menurun menimbulkan kecemasan akan perebutan kekuasaan. Terjadilah sebuah peristiwa tragis. Sekelompok orang menyusun sebuah rencana untuk menculik dan membunuh para jendral petinggi

---

<sup>32</sup> *ibid.*, hlm.68.

Angkatan Darat sebagai upaya kudeta terhadap “dewan jendral” dan menamakan dirinya sebagai G30S.<sup>33</sup>

Di tengah situasi demikian, pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965 Panglima Angkatan Darat Letnan Jendral Ahmad Yani dan enam orang jendral Angkatan Darat lainnya diculik dari rumah-rumah mereka di Jakarta. Dibawa dengan truk ke sebidang areal perkebunan di selatan kota. Para penculik membunuh Yani dan dua jendral lainnya pada saat penangkapan berlangsung. Ketika tiba di areal perkebunan mereka membunuh tiga jendral lainnya. Kemudian keenam jasad tersebut dimasukan dalam sebuah sumur kosong. Jendral Nasution yang menjadi sasaran utama penangkapan berhasil melarikan diri, sebaliknya Lettu Pierre Tendean seorang Letnan yang salah tangkap justru menjadi korban sasaran dan ikut dimasukan ke dasar sumur yang sama.<sup>34</sup> Peristiwa ini telah memakan korban enam jendral Angkatan Darat, seorang letnan, serta Ade Irma Nasution putri bungsu Nasution yang berusia lima tahun dan tewas tertembak.

Pagi hari itu juga orang-orang di balik peristiwa pembunuhan ini menduduki stasiun pusat Radio Republik Indonesia (RRI). Melalui siaran radio mereka menyatakan diri sebagai anggota pasukan yang setia kepada Presiden Sukarno. Adapun tujuan aksi yang mereka umumkan ialah untuk melindungi presiden dari komplotan jendral kanan yang akan melancarkan kudeta serta mengumumkan bahwa pemerintahan Sukarno telah dibubarkan dan diganti oleh

---

<sup>33</sup> A. Pambudi, 2011, *Fakta dan Rekayasa G30S*, Jakarta: hlm. 390-391.

<sup>34</sup> Roosa, John, 2006, *op.cit.*, hlm. 3.

suatu dewan revolusioner. Mereka menyebut nama pemimpin mereka Letkol Untung.

Terbunuhnya A.Yani pada peristiwa tersebut membuat Suharto mengambil alih komando Angkatan Darat kemudian meluncurkan serangan balik terhadap pasukan G30S. Pasukan G30S meninggalkan RRI dan Lapangan Merdeka yang sempat mereka duduki selama dua belas jam. Semua pasukan G30S akhirnya ditangkap atau melarikan diri dari Jakarta pada pagi hari 2 Oktober. Di Jawa Tengah G30S hanya bertahan hingga 3 Oktober. Gerakan 30 September lenyap sebelum mereka sempat menjelaskan tujuannya kepada publik.<sup>35</sup>

Sejak pagi hari 1 Oktober 1965 situasi di Ibukota menjadi tegang dan serba tidak menentu. Dengan cepat para pemimpin Angkatan Darat menghubungi kelompok-kelompok anti-komunis, termasuk organisasi-organisasi muslim yang selama berbulan-bulan sudah mengumpulkan massa untuk melawan PKI dan melakukan aksi balas dendam. Pada 2 Oktober kepala politik KOTI Brigjen Sutjipto mengundang rapat pemimpin-pemimpin anti-komunis yang membentuk Kesatuan Aksi Penumpasan Gerakan 30 September (KAP-Gestapu). Kemudian menggelar demonstrasi pertamanya yang mengecam PKI dan Aidit.

Pada tanggal 4 Oktober 1965 jenazah enam jendral dan seorang ajudan Nasution ditemukan di dalam sebuah sumur yang dikenal sebagai Lubang Buaya. Potret jenazah mereka serta hasil otopsi yang palsu dimuat di berbagai surat kabar membangkitkan amarah rakyat. Peringatan HUT ABRI pada 5 Oktober 1965 dirayakan dalam suasana duka. Prosesi pemakaman berlangsung dengan cara yang

---

<sup>35</sup> Sulisty, Hermawan, *op.cit.*, hlm.10.

tidak biasa. Jenazah para jendral diletakan diatas tank sebagai lambang kemarahan dan tekad untuk membalas dendam. Jendral Nasution menyampaikan sambutan pada kesempatan itu tetapi Presiden Sukarno tidak hadir. Meskipun dengan alasan keamanan ketidakhadiran Sukarno dianggap sebagai skandal.<sup>36</sup>

Sukarno menyadari bahwa kekuatan politik yang dilepaskan pada 1 Oktober 1965 mengancam kekuasaannya. Ia segera berupaya mengembalikan Angkatan Darat di bawah kendalinya. Sukarno juga ingin melindungi Angkatan Udara sekutu militer terdekatnya dari kemarahan Angkatan Darat. Serta mencegah perpecahan di tubuh PKI yang dapat menghancurkan keseimbangan kekuatan. Dalam siaran radio Sukarno menghimbau semua pihak untuk tenang, menyangkal keterlibatan angkatan udara dalam Gerakan 30 September dan memperingatkan “kita harus waspada agar Angkatan Darat dan Angkatan Udara tidak saling beradu yang malah menguntungkan Nekolim dan yang lain”.

Menjelang Peristiwa 30 September 1965 ABRI dalam kondisi rapuh karena diperlemah oleh faksionalisme politik, korupsi dan segala macam unsur pemecah belah seperti identitas etnis dan agama. Mereka berusaha mengkonsolidasi diri setelah mengalami peristiwa G30S. Angkatan Darat telah lama terlibat konflik dengan PKI. Kini PKI yang dicurigai sebagai dalang pembunuh para jendral akan diperlakukan sebagai musuh bersama agar tentara dapat mengkonsolidasi diri. Suatu rencana kemudian muncul. Pertama, PKI harus dapat dibuktikan sebagai dalang pembunuhan para jendral sehingga hukuman yang setimpal bisa diberikan. Kedua, kampanye melawan PKI nantinya akan

---

<sup>36</sup> Roosa, John, *op.cit.*, hlm.26.

dimanfaatkan untuk mempersatukan tentara. Suharto lantas memimpin berbagai manuver militer dan politik untuk mencapai kedua tujuan tersebut.<sup>37</sup>

## **B. Pembantaian Massal PKI Tahun 1965-1966 di Jawa**

Menyusul terjadinya peristiwa penculikan dan pembunuhan 6 jendral Angkatan Darat pada 1 Oktober 1965, terjadilah pembantaian massal di mana-mana. Dimulai di Jakarta ketika para jendral Angkatan Darat diculik dan dibunuh. Serangkaian aksi balas dendam pun terjadi, dengan menangkap serta membunuh anggota dan simpatisan PKI secara kejam. Semua partai kelas buruh yang diketahui, ratusan ribu pekerja dan para petani pendukung PKI ditangkap, dibunuh, serta sebagian dimasukkan ke dalam kamp-kamp tahanan untuk disiksa dan diinterogasi.

Pembantaian massal terjadi secara bergelombang di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan berbagai tempat lain di seluruh negeri. Mereka yang menjadi korban pembantaian massal adalah rakyat biasa yang kemungkinan besar tidak tahu menahu dan tidak memiliki keterkaitan dengan peristiwa G30S. Dalam jumlah besar mereka dieksekusi tanpa melalui proses pengadilan. Jumlah korban sedemikian besar sehingga dapat dikatakan sebagai pembunuhan warga sipil terbesar yang pernah terjadi di Indonesia.<sup>38</sup>

Dalam beberapa minggu kemudian setelah terjadi peristiwa G30S militer dengan cepat mengkonsolidasikan kekuatannya dan mendorong kelompok-

---

<sup>37</sup> Sulistyono, Hermawan, *op.cit.*, hlm.23.

<sup>38</sup> T. Wardaya, Baskara, *op.cit.*, hlm.146-147.

kelompok anti-komunis dan kelompok-kelompok agama untuk bergerak melawan PKI sembari menciptakan alasan-alasan publik bahwa PKI merupakan ancaman yang mematikan untuk Indonesia. KAP-Gestapu mengadakan aksi demonstrasi kedua di Jakarta kali ini menghadirkan puluhan ribu massa kemudian mereka menyerang dan membakar kantor pusat PKI yang baru. Macam-macam coretan dan grafiti yang berbunyi “Ganjang PKI” “Ganjang Aidit” memenuhi seantero kota.<sup>39</sup>

Ali Murtopo sebagai Komandan Operasi Pasukan Khusus (OSPUS) memperluas propaganda Angkatan Darat. Laporan-laporan dan foto-foto yang mengerikan dugaan mutilasi beredar di seluruh Indonesia. Koran-koran militer melaporkan penemuan daftar terencana pembunuhan oleh PKI, kuburan masal dan dokumen-dokumen berisi detail rencana partai itu untuk membunuh lawan-lawannya. Suharto dan para pemimpin Angkatan Darat bertekad menggunakan peristiwa pembunuhan para jendral untuk bergerak melawan PKI untuk merebut kekuasaan. Dalam melaksanakan tujuan tersebut mereka mendapat dukungan dari para sekutu baik dari dalam maupun luar negeri.

Pada 18 Oktober 1965 Suharto mengerahkan sejumlah batalion RPKAD di bawah komando Letnan Kolonel Sarwo Edhie ke Jawa Tengah. Kemudian aksi pembantaian massal terhadap para pendukung PKI dimulai.<sup>40</sup> Pergolakan terus terjadi di Jawa Tengah sekitar tanggal 20-21 Oktober 1965 khususnya di daerah Klaten dan Boyolali. Pada dinihari 23 Oktober 1965 sekitar 250 orang dibunuh secara beramai-ramai di Boyolali. Banyak warga keturunan Cina di Semarang,

---

<sup>39</sup> R.Simpson, Bradley, *op.cit.*, hlm.241.

<sup>40</sup> *ibid.*, hlm 246



Yogyakarta dan Surakarta juga menjadi korban amuk massa.<sup>41</sup> Jawa Tengah menjadi lokasi pertama perburuan PKI. Tentara memburu Aidit yang melarikan diri ke Jawa Tengah dan menumpas basis PKI yang tak siap di sana. Tentara tak hanya melancarkan operasi terhadap para pengurus PKI, melainkan juga terhadap anggota dan simpatisannya.

Selanjutnya pada bulan November pembunuhan berlangsung di Jawa Timur. Dihasut dan didukung oleh tentara, kelompok pemuda muslim sayap kanan seperti barisan Ansor NU melakukan pembantaian massal di Jawa Timur. Sejak diberlakukannya Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-undang Bagi Hasil (UUBH) pada tahun 1960 terjadi ketegangan antara PKI dan para tuan tanah. Aksi perebutan hak atas tanah yaitu tanah wakaf yang dimiliki oleh para pesantren telah menimbulkan konflik terbuka dengan umat muslim. Kemudian dari hal tersebut konflik melebar dan menjadi salah satu faktor yang mendorong pembantaian massal.<sup>42</sup>

Bagi para kiai dan pesantren aturan Undang-undang Agraria telah merugikan. Banyak dari antara para kiai selain sebagai tokoh agama yang disegani juga merupakan tuan tanah. Banyak kiai memecah tanah dengan memberikan kepada saudara atau diwakafkan agar tak terkena aturan *land reform* tersebut. Sebelum ketentuan itu berlaku PKI telah mengincar tanah-tanah milik kiai, selain tanah milik negara untuk dibagikan kepada rakyat jelata. Dengan semboyan “tanah untuk rakyat” cara tersebut telah berhasil menarik pendukung. Jawa Timur

---

<sup>41</sup> T. Wardaya, Baskara, *op.cit.*, hlm 172-173

<sup>42</sup> Kurniawan *et al*, 2013, *Pengakuan Algojo 1965 Investigasi Tempo Perihal Pembantaian 1965*, Jakarta:hlm.23-25.

khususnya Kediri dan Jombang yang menjadi pusat Nahdlatul Ulama secara perlahan pengikutnya menyatakan bergabung dengan Partai Komunis Indonesia. Hal tersebut telah membuat geram para ulama dan pengikutnya. Karena Partai Komunis Indonesia dianggap telah menghina agama dan merampas tanah milik para kiai.<sup>43</sup>

Pada 13 November kepala penerangan polisi Kolonel Budi Juwono melaporkan bahwa setiap malam antara 50-100 anggota PKI dibunuh di Jawa Timur oleh kelompok-kelompok sipil anti-Komunis dengan bantuan tentara. Misionaris di Jawa Timur menyampaikan kepada konsulat di Surabaya bahwa menurut laporan 150.000 orang telah dibantai di Tulungagung. Di Kediri 300 petani gurem dibunuh, di Wates 1.200 orang dibunuh. Di Ponggok sekitar 300 orang dibunuh. Banyak di antara mereka yang dibunuh itu adalah pengikut PKI yang tidak mengerti apa-apa.

Kediri diduga menjadi tempat pembantaian paling besar di Jawa Timur. Puluhan kelompok yang berjumlah puluhan ribu orang terdiri atas santri dari berbagai pondok pesantren serta anggota Ansor dan Banser serentak menyisir kantong-kantong PKI di Kediri. Sebelum bergerak massa mengikuti apel siaga yang digelar di alun-alun kota. Apel dipimpin Syafi'i Sulaiman dan H.Toyip, dua tokoh Nahdlatul Ulama terkemuka di Kediri. Mereka memberikan instruksi tegas kepada peserta apel: "Tumpas PKI!". Apel siaga tersebut merupakan tonggak awal penumpasan anggota PKI dan orang yang dianggap terkait dengan partai tersebut. Pembantaian berskala besar dan terbuka selanjutnya terjadi selama

---

<sup>43</sup> *ibid.*, hlm.23.

berbulan-bulan di seluruh wilayah kota ini. Salah satu lokasi favorit pembantaian adalah gisikan atau sepanjang pinggiran Sungai Berantas yang membelah wilayah Kediri. Kepala korban dipenggal lantas dilempar ke sungai.<sup>44</sup>

Belum ada angka pasti mengenai jumlah korban pembantaian pada waktu itu. Namun sejak operasi penumpasan dimulai, Sungai Berantas menjadi kuburan terapung. Mayat-mayat sebagian besar tanpa kepala mengambang di sepanjang sungai. Bau busuk menguar. Tidak ada orang yang berani menangkap ikan serta bersedia makan ikan dari sungai tersebut. Kediri juga merupakan penyumbang tahanan PKI terbesar di Jawa Timur. Berdasarkan data Direktorat Sosial Politik Provinsi Jawa Timur pada 1981, jumlah mantan tahanan terkait dengan PKI yang dibebaskan dan wajib lapor sebanyak 446.803 orang di seluruh Jawa Timur. Sebanyak 83.800 orang berasal dari Kediri.<sup>45</sup>

Di Jawa Barat tidak terdapat aksi pembunuhan massal karena RPKAD tak menjamah wilayah ini. Mayor Jendral Ibrahim Adjie memerintahkan agar kesatuannya menangkap orang-orang PKI untuk diamankan tetapi jangan sampai terjadi pembunuhan. Di Indramayu terdapat orang yang dituduh anggota PKI menjadi korban. Namun kejadian tersebut tidak meluas. Perintah Ibrahim tampaknya diikuti tentara hingga level paling bawah. Mayor Jendral Ibrahim tak ingin ada pembantaian di Jawa Barat karena merasa sebagian besar korban adalah orang kecil. Sikap Ibrahim Adjie tersebut tak lepas dari sikap setianya kepada Sukarno. Pada tanggal 1 Oktober 1965 presiden memerintahkan semua pihak menghentikan aksi agar suasana tidak menjadi runyam. Pada hari yang sama

---

<sup>44</sup> *ibid.*, hlm.10- 12.

<sup>45</sup> *ibid.*, hlm.12.

Sukarno mengirim sepucuk surat kepada Ibrahim yang isinya meminta ia datang ke Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma jika keselamatan presiden terancam.<sup>46</sup>

Pembunuhan baik dalam bentuk operasi militer atau konflik sipil terjadi hampir diseluruh negeri. Tak ada angka yang pasti mengenai jumlah korban. Pada Desember 1965 Sukarno membentuk komisi pencarian fakta yang dipimpin Menteri Negara Oei Tjoe Tat untuk menyelidiki jumlah korban. Kerja komisi tidak lancar karena pembantaian masih berlangsung dan akses ke daerah sangat terbatas. Namun karena tak leluasa bekerja dan khawatir pada reaksi tentara, komisi tersebut menyimpulkan tujuh puluh delapan ribu orang terbunuh. Padahal pembunuhan masih berlangsung hingga sekitar setahun kemudian. Laporan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) menyebutkan korban tewas sekitar satu juta orang. Menurut Mantan Komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat Sarwo Edhie Wibowo mengungkapkan setidaknya tiga juta orang terbunuh. Para aktivis “kiri” mempercayai total korban berjumlah dua juta orang.<sup>47</sup>

Perkiraan jumlah korban sangat bervariasi, mulai dari yang paling kecil sebesar tujuh puluh delapan ribu orang hingga yang paling tinggi tiga juta orang. Jumlah korban yang umumnya diterima berkisar antara lima ratus ribu hingga satu juta orang. Setiap perkiraan jumlah korban membawa muatan politik tersendiri. Meminjam istilah Robert Cribb, kaum kiri membesar-besarkan skala pembunuhan untuk menekankan kesalahan para pelaku. Namun bagi para penentang komunis

---

<sup>46</sup> *ibid.*, hlm.82-82.

<sup>47</sup> *ibid.*, hlm.132-135

angka yang tinggi menegaskan bahaya PKI, angka yang rendah akan mengurangi kesalahan mereka.

Pada umumnya pembunuhan massal tahun 1965 merupakan eksekusi terhadap tawanan PKI. Biasanya pasukan Suharto memilih melakukan penghilangan misterius ketimbang eksekusi di depan publik untuk memberi contoh pada masyarakat. Tentara dan milisi cenderung melakukan pembantaian besar-besaran secara rahasia. Mereka mengambil para tahanan dari penjara pada malam hari kemudian dibawa dengan truk ke tempat-tempat terpencil. Mengeksekusi mereka kemudian mengubur jasad-jasad mereka dalam kuburan massal tanpa tanda atau melemparnya ke sungai. <sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> John Roosa *et al*, 2004, *Tahun Yang Tak Pernah Berakhir*, Jakarta: hlm. 8-18.

### **BAB III**

## **SIKAP PEMERINTAH ORDE BARU MENAFSIR DAN MENGAMBIL TINDAKAN TERHADAP TRAGEDI 1965**

### **A. Rezim Orde Baru Berkuasa**

Berbagai kekacauan yang terjadi pasca G30S telah memakan banyak korban. Angkatan Darat kemudian mendesak Presiden Sukarno untuk membubarkan PKI. Dengan melarang partai ini dan membubarkan anggotanya lebih mudah bagi tentara untuk mengendalikan negara sekaligus melakukan konsolidasi interen. Namun Sukarno menolak, ia tetap mempertahankan kepercayaannya terhadap filosofi Nasakom (Nasionalisme, Agama dan Komunisme) dengan penghapusan terhadap PKI akan menciptakan ketidakseimbangan bangsa.<sup>49</sup>

Akhirnya setelah melalui berbagai propaganda dan strategi sistematis yang dilakukan Angkatan Darat, pada 11 Maret 1966 Sukarno mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar).<sup>50</sup> Menurut versi resmi Supersemar merupakan pelimpahan wewenang politik kepada Suharto. Surat perintah ini dimaksudkan untuk memberi Suharto kekuasaan operasional guna memulihkan ketertiban dan stabilitas. Hingga saat ini Supersemar masih menjadi kontroversi karena situasi saat Sukarno menandatangani surat itu tidak jelas serta tidak ada

---

<sup>49</sup> Sulisty, Hermawan, *op.cit.*, hlm.10.

<sup>50</sup> *ibid.*, hlm.12.

indikasi bahwa Sukarno tunduk pada kudeta terselubung tersebut. Menurut Crouch, Supersemar diperoleh dengan cara kekerasan. Supersemar ditandatangani oleh Sukarno dalam keadaan pistol ditempelkan di pelipis Sukarno. Artinya jika Sukarno tidak segera melimpahkan kekuasaan kepada Suharto, maka keselamatan Sukarno dan keluarganya tidak terjamin.<sup>51</sup>

Pada tanggal 12 Maret 1966 Suharto mengumumkan pelarangan dan pembubaran PKI. Kemudian menyusun cara yang lebih sistematis di seluruh Indonesia untuk membersihkan PKI. Dengan kekuasaan *de facto* untuk mengontrol birokrasi, Suharto membersihkan anggota dan simpatisan PKI dari pemerintahan. Kekuasaan politik bergeser dalam kurun waktu kurang dari dua tahun sejak peristiwa 1 Oktober 1965 terjadi. Sebagian karena didorong oleh ketidakpuasan masyarakat serta penguasa yang baru dengan cepat mengambil alih seluruh kekuasaan. Naiknya Suharto ke puncak kekuasaan tak terkalahkan lagi, mengungguli calon-calon pemimpin nasional potensial lain seperti Jendral Nasution.<sup>52</sup>

Suharto mencopot kedudukan dan menangkap para menteri dari pemerintahan Sukarno. Kemudian pada bulan Juli 1966 Suharto mendukung Nasution untuk diangkat menjadi Ketua MPRS. Maka tanggal 5 Juli 1966 MPRS yang dipimpin oleh Nasution mengeluarkan Ketetapan No. XIII/MPRS/1966 menugaskan Jendral Suharto selaku pengemban Supersemar untuk membentuk Kabinet AMPERA menggantikan Kabinet DWIKORA. Kabinet ini tidak lagi

---

<sup>51</sup> M.R Siregar, 2007, *Tragedi Manusia dan Kemanusiaan Holokaust Terbesar Setelah Nazi*, Yogyakarta: hlm 194.

<sup>52</sup> Sulisty, Hermawan, *op.cit.*, hlm. 13-14.

dikepalai oleh presiden Sukarno tetapi oleh Jendral Suharto dengan gelar Ketua Presidium Kabinet. Sejak itu secara formal berakhirilah pemerintahan Sukarno.<sup>53</sup>

Sebelum Nasution ditunjuk sebagai ketua MPRS sidang pada bulan Juni telah mengesahkan beberapa ketetapan yang lain. Seperti kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, mencabut ketetapan MPRS tahun 1963 yang mengangkat Sukarno sebagai “Presiden Seumur Hidup”. Selain itu secara eksplisit Sukarno dilarang mengeluarkan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan presiden. Dalam sidang bulan Juni Sukarno masih diperbolehkan bicara tetapi dengan tujuan supaya mengakui dirinya terlibat dalam G30S, membenarkan segala tindakan Suharto sejak 1 Oktober 1965 serta membenaran pembantaian massal terhadap komunis.<sup>54</sup>

Suharto menerapkan kebijakan melakukan pembubuhan kode “ET” (Eks Tapol) pada KTP milik orang-orang yang melawan kebijakan penguasa. Membuat orang-orang tersebut ketakutan dan berpikir ulang jika tidak tunduk pada penguasa. Dampak yang harus ditanggung para korban tertuduh PKI adalah hilangnya hak-hak mereka sebagai warga negara. Mereka mengalami stigmatisasi yang merugikan secara sosial, politik dan ekonomi. Lebih dari sekedar itu ingatan masyarakat akan apa yang terjadi pada tahun 1965 menjadi kabur dan campur aduk. Masyarakat menjadi sulit membedakan antara peristiwa G30S, pembunuhan massal serta berbagai upaya fakta-fakta mengenai Tragedi '65 yang telah dimanipulasi. Pengkaburan fakta-fakta Tragedi '65 menyebabkan tidak adanya

---

<sup>53</sup>Siregar, M.R, *op.cit.*, hlm.196-197.

<sup>54</sup>*ibid.*, hlm.197-198.



upaya hukum untuk secara serius mengadili para pemberi komando maupun para pelaku-pelaku lapangan atas pembantaian massal itu.<sup>55</sup>

Pada masa kepemimpinannya Suharto membangun sebuah monumen peringatan. Monumen didirikan dengan tujuh patung perunggu para perwira yang tewas, semua berdiri setinggi manusia dengan sikap gagah dan menantang. Pada dinding belakang deretan patung para perwira ditempatkan patung garuda raksasa dengan sayap mengembang, burung khayali yang telah diangkat Indonesia sebagai lambang kebangsaannya. Rezim Suharto menetakkan relief dari perunggu di dinding seputar monumen dengan tinggi sebatas tatapan mata. Jika pengunjung berjalan menyusuri dinding relief dari kiri ke kanan, mereka akan melihat versi sejarah Indonesia pascakolonial yang anti komunis. Dari pemberontakan Madiun tahun 1948 sampai Gerakan 30 September 1965, PKI selalu ditampilkan sebagai pemicu kekacauan. Monumen yang dibuka pada 1969 ini dinamai Monumen Pancasila Sakti.<sup>56</sup>

Setiap lima tahun sekali semua anggota parlemen berkumpul ditempat tersebut sebelum memulai sidang pertama untuk bersumpah setia kepada Pancasila. Setiap tahun pada 1 Oktober Suharto juga menyelenggarakan upacara di hadapan monumen tersebut untuk menyatakan janji kesetiaan mereka kepada Pancasila. Pada malam sebelumnya semua stasiun televisi diwajibkan menyiarkan film buatan pemerintah, *Pengkhianatan Gerakan 30 September/PKI*. Film ini berdurasi selama empat jam bercerita mengenai penculikan dan pembunuhan

---

<sup>55</sup> T. Wardaya, Baskara, *op.cit.*, hlm 173-177.

<sup>56</sup> Roosa, John, *op.cit.*, hlm.9.

tujuh perwira Angkatan Darat di Jakarta yang menjadi tontonan wajib bagi anak-anak sekolah.<sup>57</sup>

Suharto menampilkan diri sebagai penyelamat bangsa dengan menumpas G30S. Rezim Suharto terus menerus menanamkan peristiwa itu dalam pikiran masyarakat melalui narasi historisnya bahwa PKI merupakan kekuatan jahat. Para perwira Suharto mengubah Lubang Buaya lokasi pembunuhan tujuh perwira Angkatan Darat di Jakarta pada 1 Oktober 1965 menjadi tanah keramat.<sup>58</sup>

Suharto menggunakan G30S sebagai dalih untuk merebut kekuasaan serta menegakan kediktatoran militer. Dalam memoarnya Suharto menulis bahwa strateginya adalah pengejaran, pembersihan dan penghancuran. Suharto tidak memberi tahu pembaca bahwa ada orang yang tewas dalam proses itu.<sup>59</sup> Film mengenai G30S yang disponsori pemerintah juga tidak menggambarkan adanya penangkapan dan pembunuhan massal. Tidak ada tugu peringatan dibangun di Monumen Pancasila Sakti bagi ratusan ribu korban. Suharto menjelaskan kekerasan yang terjadi sebagai sesuatu yang bersumber pada konflik dalam masyarakat, dengan demikian Angkatan Darat seolah-olah tidak memainkan peran apapun dalam mengatur pembunuhan tetapi rakyat melakukannya sendiri untuk alasan yang tidak ada kaitannya dengan operasi penghancuran G30S.

---

<sup>57</sup> *ibid.*, hlm.10.

<sup>58</sup> *ibid.*, hlm.12.

<sup>59</sup> Suharto, 1989, *Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya*. Jakarta: hlm.114.

## B. Narasi Pemerintah Orde Baru Tentang Tragedi 1965

Terhadap rangkaian peristiwa yang terjadi pada tahun 1965-1966 tersebut, terdapat sejumlah narasi yang beredar di Indonesia. Narasi-narasi itu datang dari berbagai pihak baik pemerintah, sejarawan dan ilmuwan. Menurut narasi Orde Baru dan pendukungnya, penculikan dan pembunuhan sudah pasti dilakukan oleh PKI. Presiden Sukarno menurut narasi ini mengetahui bahkan terlibat dalam apa yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 1965 oleh sebab itu harus dimintai pertanggungjawaban.<sup>60</sup>

Pembunuhan massal yang terjadi di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sejumlah tempat lain di Indonesia bersifat spontan dan merupakan “ungkapan balas dendam” warga sipil terhadap PKI yang telah melakukan pembunuhan para Jendral AD di Jakarta. Ditekankan oleh narasi pemerintah Orde Baru bahwa orang-orang komunis adalah “pengkhianat negara” yang ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dengan ideologi komunis yang ateis.<sup>61</sup>

Dua buku yang paling berpengaruh di ingatan publik terkait dengan kisah seputar gerakan pembunuhan perwira-perwira tinggi Angkatan Darat yaitu “buku putih”. Buku karya Nugroho Notosusanto yang terbit tahun 1968 berjudul *Tragedi Nasional: Percobaan Kup G 30 S/PKI di Indonesia* dan buku *Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia: Latar Belakang, Aksi, dan Penumpasannya* terbitan Sekretariat Negara Republik Indonesia tahun 1994. Kedua buku tersebut merupakan narasi yang dibuat oleh pemerintah Orde Baru dan mencerminkan sikap resmi bagaimana pemerintah Orde Baru menafsir dan

---

<sup>60</sup> Baskara, T. Wardaya, Ed. 2014, *Luka Bangsa Luka Kita*, Yogyakarta: hlm. 6-7.

<sup>61</sup> *ibid.*, hlm 7.

mengambil tindakan terhadap Gerakan 30 September. Semua cerita, skenario, dan juga pandangan-pandangan dalam melihat peristiwa itu mengacu pada cerita PKI yang menjadi dalang peristiwa G30S.<sup>62</sup>

Dua “buku putih” beredar di ribuan sekolah di semua strata, dari SD hingga Perguruan Tinggi selama puluhan tahun. Berhasil menanamkan pesan bahwa PKI penjahat. “Paham jahat” ini tidak layak hidup di bumi Indonesia yang berasaskan Pancasila di mana salah satu asasnya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena kejahatannya jutaan orang pengikut PKI harus dibunuh. Maka sudah sepantasnya jika PKI menerima hukuman pembunuhan tersebut.<sup>63</sup>

Buku lain terkait dengan Tragedi<sup>65</sup> berjudul 40 Hari Kegagalan G30S disusun oleh Pusat Sedjarah Angkatan Bersendjata. Buku tersebut secara terang-terangan menyalahkan dan menganggap PKI sebagai dalang dari peristiwa G30S. Narasi resmi tersebut juga menetikberatkan kerja sama antara militer dan rakyat dalam “mengganyang PKI” sambil menunjukan “kekuatan Tuhan” selalu berada di pihak yang “benar”. Buku ini menjadi penting bagi pemerintah Orde Baru karena merupakan *template* awal dari pembentukan narasi resmi atas tragedi 1965.<sup>64</sup>

Ditekankan oleh narasi-narasi tersebut bahwa: (a) komunisme harus dilarang di Indonesia; (b) rakyat Indonesia harus selalu waspada terhadap “bahaya laten” komunis yang selalu siap mengancam keberlangsungan negara Indonesia; (c) supaya terhindar dari komunisme, Indonesia harus diperintah oleh suatu

---

<sup>62</sup> <http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1994/10/10/0002.html>/diakses pada 16 Februari 2015.

<sup>63</sup> *ibid.*,

<sup>64</sup> T. Wardaya, Baskara, *op.cit.*, hlm.364.

pemerintahan militer; (d) jangan sampai terjadi rekonsiliasi antara pemerintah dan mantan pelaku dengan survivor Tragedi<sup>65</sup> karena hal itu bisa diartikan sebagai pendorong bangkitnya kembali komunisme di Indonesia.<sup>65</sup>

Narasi resmi mengenai Tragedi<sup>65</sup> yang diproduksi dan dikembangkan oleh pemerintah Orde Baru tidak melihat peristiwa itu sebagai sebuah peristiwa kemenangan gemilang Pancasila terhadap suatu kejahatan yang bernama komunisme. Narasi resmi ini dipenuhi dengan berbagai pengingat mengenai “keji”-nya ideologi komunisme. Narasi resmi pemerintah Orde Baru memberikan legitimasi bagi siapapun yang memegang kendali kekuasaan.<sup>66</sup>

Narasi resmi tentang tragedi 1965 pada mulanya muncul sebagai jawaban atas kesimpangsiuran dan ketidakjelasan situasi setelah terjadinya penculikan dan pembunuhan para perwira Angkatan Darat di Jakarta yang berakhir di sebuah sumur tua di wilayah Lubang Buaya. Dalam suasana yang serba membingungkan itu, ditambah dengan memanasnya keterangan antara pihak komunis dan nonkomunis, pemerintah Orde Baru di bawah pimpinan Mayjend Suharto merasa perlu untuk sesegera mungkin membuat sebuah narasi resmi yang mengklaim kebenaran atas narasi tersebut.<sup>67</sup>

Agar narasi tersebut dapat diterima masyarakat, diperlukan sebuah kontrol yang kuat terhadap media massa. Tak mengherankan, pada hari-hari pertama semenjak pecahnya peristiwa penculikan dan pembunuhan itu, informasi resmi

---

<sup>65</sup> T. Wardaya, Baskara. *loc.cit.* hlm. 7.

<sup>66</sup> *ibid.*, hlm.361.

<sup>67</sup> *ibid.*, hlm.362.

yang beredar hanya bisa didapat masyarakat melalui surat kabar militer seperti harian *Angkatan Bersendjata* dan *Berita Yudha*.<sup>68</sup>

Dapat dikatakan narasi-narasi pemerintah Orde Baru baik dalam bentuk literatur, ritual tahunan hari Kesaktian Pancasila, Monumen Pancasila Sakti serta film dokumenter karya sutradara Arifin C. Noer yang berjudul “Pemberontakan G30S/PKI” atau juga dikenal sebagai film “Pengkhianatan G30S/PKI” sangatlah efektif mempengaruhi masyarakat Indonesia. Di antara sedikit kajian mengenai topik yang ada, majalah mingguan *Tempo* dan surat kabar harian *Kompas* pernah melakukan jajak pendapat tentang persepsi masyarakat mengenai Tragedi 1965 dan komunisme. Dalam survei pada 1999 majalah *Tempo* menemukan bahwa 975 responden telah menonton film pengkhianatan itu dan dari angka tersebut 72% responden tersebut menganggap film tersebut sebagai sumber informasi utama mengenai apa yang terjadi pada 1 Oktober 1965. Pada September 2002, *Kompas* menerbitkan hasil survei mereka yang menunjukkan bahwa 77% responden melihat komunis itu sama dengan sifat “sadistik, ateis, dan amoral”. Lebih dari separuh responden juga setuju jika dikatakan bahwa komunis itu sama dengan pembunuh.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> *ibid.*, hlm.363.

<sup>69</sup> Lihat *Tempo* 3 Oktober 1999 dan jajak pendapat *Kompas* pada 30 September 2002. *ibid.*, hlm 366.

## BAB IV

### MENGANALISIS TRAGEDI 1965 DENGAN TEORI KAMBING HITAM RENE GIRARD

#### A. Situasi Ekonomi-Politik di Indonesia pada Tahun 1950-1965 Sebagai Perwujudan “*Chaos*”

Sebagaimana telah dibahas pada bab II kondisi krisis di Indonesia pada tahun 1950-1965 kiranya telah membuktikan pemikiran Girard bahwa masyarakat sangat rapuh, rawan dan mudah pecah kedalam konflik. Diawali oleh kegagalan sistem pemerintahan Sukarno yang menyebabkan berbagai persoalan sosial dan ekonomi di Indonesia. Rivalitas di panggung politik serta kondisi ekonomi Indonesia saat itu mengalami hiper-inflasi yang menjadi. Persoalan-persoalan tersebut telah menyebabkan masyarakat terbenam dalam krisis.

Di tengah situasi krisis tersebut, iklim politik di Indonesia kian tidak stabil serta ketegangan di antara tentara, Partai Nasionalis, partai-partai Islam (NU, Masyumi) dan PKI memuncak. Terdapat ketidakpuasan terhadap pemerintahan Sukarno serta hubungan antara Sukarno dan sejumlah golongan tentara agak memanas. Beberapa upaya pembunuhan Sukarno terjadi. Ada rumor bahwa para jenderal berencana menggulingkannya. Ditengarai kudeta terhadap Sukarno yang dilakukan oleh “Dewan Jendral” direncanakan pada Hari Angkatan Bersenjata 5 Oktober 1965. Untuk melindungi presiden, komandan pro-Sukarno mengambil tindakan pencegahan dengan melancarkan perlawanan kepada jenderal-jenderal

tertentu yang dikabarkan akan melakukan kudeta terhadap presiden dalam waktu dekat. Lingkaran pengawal presiden yang bertugas melawan para jendral pembelot dipimpin oleh Letkol Untung.<sup>70</sup>

Kekacauan dan ketidakpastian politik tersebut telah memicu kekerasan. Kekerasan terjadi pada peristiwa G30S. Di tengah krisis yang sedang melanda Indonesia peristiwa G30S semakin memperburuk keadaan. Suharto sebagai salah satu jendral Angkatan Darat diduga telah lama mengincar kekuasaan Sukarno. Terkait dengan peristiwa ini Suharto terkesan sangat cekatan dalam melaksanakan aksinya untuk menindaklanjuti peristiwa G30S.

Suharto memanipulasi fakta pembunuhan para jendral Angkatan Darat pada 1 Oktober 1965. Suharto menuduh PKI, mencoba menggulingkan pemerintahan dan merampas kekuasaan untuk dirinya sendiri serta memulai pemerintahan tangan besi selama lebih dari tiga dekade. Menurut sebuah laporan yang dikenal dengan nama Cornell Paper, Benedict Anderson dan Ruth McVey mengungkapkan bahwa G30S seluruhnya adalah persoalan internal AD yang akan selalu dituduhkan ke PKI, bahwa aksi tersebut merupakan hasil ketidakpuasan di sisi kalangan bawah yang merasakan sulitnya mendapat promosi dan kebencian kepada jendral-jendral yang korup bergaya hidup mewah. Selanjutnya Anderson menambahkan bahwa G30S adalah masalah perpecahan militer dan PKI hanya dimainkan sebagai pelengkap bahwa pembunuhan Jendral sayap kanan malam itu adalah anggota Dewan Jendral yang sedang merencanakan pembunuhan Sukarno dan menetapkan dirinya sebagai junta militer. Anderson juga mengklaim bahwa

---

<sup>70</sup> Wu Da Ying, *et al.* 2015, *Menembus Badai Pengembaraan Seorang Tionghoa-Indonesia Melintasi Rasisme, Kebangsaan dan Sains*. Yogyakarta: hlm 187.



Suharto mengetahui rahasia plot pembantaian para jendral Angkatan Darat pada 1 Oktober 1965.<sup>71</sup> Hal tersebut kiranya dapat membuktikan bahwa peristiwa G30S merupakan konspirasi terencana untuk menjatuhkan kekuasaan Sukarno.

G30S hingga kini masih menyisakan misteri. G30S gagal sebelum kebanyakan orang sempat mengetahui latar belakang dan keberadaannya. G30S tumbang secepat kemunculannya. Meskipun berumur pendek G30S memiliki dampak yang luar biasa karena mengubah tatanan politik di Indonesia. Kudeta merangkak dilakukan Suharto di bawah selubung usaha mencegah kudeta.

Menurut Hermawan Sulisty, istilah-istilah Gestapu, Gestok serta Gerakan 30 S/PKI menjadi penting sebagai penunjuk adanya dua fase yang berbeda atas rangkaian peristiwa yang terjadi. Sebagai pembeda antara kelompok politik yang memenangkan konflik dan mereka yang kehilangan kekuasaan. Istilah-istilah tersebut di kemudian hari mempengaruhi pola-pola interpretasi dan analisis historiografi. Istilah Gestok misalnya, yang digunakan oleh Sukarno tidak pernah lagi dipakai semenjak Suharto menjadi penguasa negara.<sup>72</sup>

Hal tersebut terjadi sejak zaman Orde Baru. Menurut Hersri Setiawan, Orde Baru tidak hanya telah memutar-balik sejarah bangsa tetapi juga telah mengubah makna pada banyak kata-kata. Diubah maknanya secara kabur dan membuat dalam kata-kata singkatan atau akronim model bahasa sandi dunia militer.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> *ibid.*, hlm.192-193

<sup>72</sup> John Hughes, wartawan Amerika Serikat pertama yang meliput Gerakan 30 September, mencatat istilah Gestapu pertama kali digunakan beberapa saat setelah jenazah para jendral dimakamkan pada 5 Oktober 1965. Sulisty, Hermawan, *op.cit.*, hlm.3-4.

<sup>73</sup> Hersri Setiawan, 2003, *Aku Eks Tapol*, Yogyakarta: hlm 383-384.

Sukarno tidak menggunakan akronim Gestapu atau G30S tetapi lebih memilih menggunakan istilah Gestok (Gerakan Satu Oktober) untuk mengimplikasikan Suharto dengan peristiwa yang terjadi. Suharto selalu membantah bahwa ia melakukan kudeta dan mengklaim bahwa kekuasaannya diperoleh melalui cara-cara konstitusional. Suharto mencapai kekuasaannya menggunakan peristiwa Gerakan 30 September dengan menuduh PKI melakukan kudeta. Suharto menuduh PKI mendalangi G30S sebagai percobaan kudeta tetapi namanya justru tidak tercantum dalam daftar nama jendral-jendral Angkatan Darat yang harus ditangkap dan dibunuh.<sup>74</sup>

Sebuah pengumuman pada pagi hari 1 Oktober 1965 melalui radio yang menyatakan bahwa Gerakan 30 September bertujuan untuk melindungi presiden dan mencegah terjadinya kudeta tidak menunjukan indikasi untuk melawan presiden. Pengumuman tersebut menunjukan kebingungan karena dibuat tidak oleh G30S tetapi oleh Komandan Cakrabirawa. Dalam sebuah pengumuman tandingan pada malam hari 1 Oktober 1965 menyatakan Suharto mengambil alih kepemimpinan Angkatan Darat. Dalam pidato radio tersebut Suharto tidak menyebut siapa yang memberinya kuasa untuk mengambil alih kepemimpinan Angkatan Darat dan menghancurkan Gerakan 30 September. Isu utama dari pidato itu sangat bertentangan dengan pengumuman beberapa jam sebelumnya. Hal itu menyebabkan kebingungan khususnya pada kalangan pendukung Sukarno.<sup>75</sup>

Memasuki tahun 1966 situasi semakin memburuk hingga menyebabkan tatanan sosial di Indonesia menjadi berantakan. Akibatnya situasi berubah

---

<sup>74</sup> Roosa, John, *op.cit.*, hlm 252.

<sup>75</sup> *ibid.*, hlm. 254.

menjadi kacau dan terjadi pengambilalihan kekuasaan negara terhadap tentara. Hal demikian dapat terjadi karena menurut Girard dalam masyarakat ini bertahta rivalitas tiada habisnya, yang sewaktu-waktu bisa menyulut kekerasan. Ia mengatakan bahwa manusia itu saling bersaing dalam menghasratkan sesuatu. Rivalitas itulah yang memotivasi manusia untuk bertindak, sehingga sering memicu konflik hingga berujung pada kekerasan. Betapa lemah dan rapuhnya tatanan masyarakat sehingga sewaktu-waktu bangunan tersebut dapat hancur ketika krisis melanda dan kekerasan pecah dengan tiba-tiba.

## **B. Pengejaran PKI Sebagai Tindak Pengkambinghitaman**

Krisis dan kekerasan terjadi tidak hanya pada abad masa lalu, namun hingga saat ini masih terjadi. Agama sendiri tidak berhasil meredam krisis tersebut. Menurut Girard, justru agama sering menjadi sebab terjadinya krisis tersebut. Agama bukan menjadi perekat namun pemecah yang membuat manusia terjerumus ke dalam rivalitas yang menuntun kekerasan. Girard mengatakan bahwa akan datang saatnya di mana agama tidak lagi mampu meredam kekerasan.<sup>76</sup> Kini tesis Girard tersebut meramalkan kebenaran yang menjadi kenyataan. Ketika dalam suatu masyarakat terjadi konflik atau kekacauan politik masyarakat kemudian akan mencari kambing hitam untuk dipersalahkan.

Belajar dari teori Rene Girard untuk melihat tragedi 1965 di Indonesia yang menjadi korban kambing hitam adalah PKI. Di Indonesia rezim Suharto menuduh PKI sebagai dalang peristiwa G30S lalu menjadikannya dalih untuk

---

<sup>76</sup> Sindhunata, *op.cit.*, hlm.323-333.

merebut kekuasaan. Dengan menggunakan isu-isu agama dan berbagai propaganda bahwa PKI merupakan komunis menguatkan alasan untuk membunuh orang-orang PKI pada tahun 1965-1966. Peristiwa pembunuhan massal di Jawa Tengah, Jawa Timur menunjukkan ciri-ciri teori kambing hitam Rene Girard. Karena korban dipilih secara sewenang-wenang.

Peristiwa pembunuhan massal pasca peristiwa G30S menajamkan hipotesis Girard bahwa korban berfungsi untuk menyalurkan kekerasan dalam masyarakat. Setiap kekerasan dalam masyarakat selalu mencari penyaluran secara sewenang-wenang. Para anggota dan simpatisan PKI dikorbankan untuk menebus kesalahan mereka yang mengorbankannya. Para korban yang ditangkap kemudian dibunuh kebanyakan tidak mengerti apa-apa. Mereka dijadikan korban kambing hitam secara sewenang-wenang. Mereka adalah korban (tanpa dosa) yang dituduh melakukan kejahatan. PKI ditunjuk sebagai kambing hitam karena pada diri mereka telah melekat stigma korban.

Berkaitan dengan ini kambing hitam yang dimaksud bukanlah penggambaran seekor kambing berwarna atau berbulu hitam. Menurut Girard kambing hitam merupakan subyek yang biasanya menjadi sasaran atau korban entah bersalah atau tidak. Bahkan dalam banyak kasus ketika mereka tidak bersalah pun mereka tetap dijadikan korban. Korban merupakan suatu peristiwa penyaluran kekerasan. Setiap kekerasan selalu mencari penyaluran secara sewenang-wenang. Ia terpaksa dikorbankan untuk menebus kesalahan dari mereka yang mengorbankannya.

Sebagaimana telah kita lihat tindak penculikan dan pembunuhan para Jendral Angkatan Darat pada 1 Oktober 1965 telah menjadi pemicu serangkaian kejadian pembunuhan anggota dan simpatisan PKI. Dalam ingatan sosial masyarakat Indonesia yang dibentuk rezim Suharto, G30S merupakan kekejaman yang begitu sadis sehingga kekerasan massal terhadap siapapun yang terlibat dengannya dilihat sebagai sesuatu yang dapat dibenarkan. G30S telah membunuh setidaknya enam orang jendral Angkatan Darat tetapi Suharto membesarkannya sehingga peristiwa ini tampak seperti sebuah konspirasi nasional berkelanjutan untuk melakukan pembunuhan massal. Berjuta-juta orang yang berhubungan dengan PKI bahkan para petani buta huruf dari dusun terpencil ditampilkan sebagai gerombolan pembunuh yang secara kolektif bertanggung jawab atas G30S.

Pemerintah Indonesia sebelum tahun 1965 tidak pernah menimpakan kesalahan secara kolektif pada sekelompok masyarakat secara keseluruhan. Contohnya pada peristiwa pemberontakan PRRI/Permesta Sukarno hanya melarang PSI dan Masyumi. Ia tidak mencap semua anggota PSI dan Masyumi sebagai pengkhianat negara. Pemerintah tidak menahan atau membunuh orang hanya karena mereka anggota kedua partai itu.<sup>77</sup>

Tidak pernah terbayang sebelumnya jika Partai Komunis Indonesia (PKI) yang memiliki jutaan pendukung dan mendapat dukungan dari Presiden Sukarno telah hancur lebur diterpa prahara G30S. Tak pernah terbayang jika partai yang sangat populer ini dikorbankan melalui stigma kesalahan kolektif, kebohongan

---

<sup>77</sup> J. Sumardianta, 2008, *Simply Amazing*, Jakarta: hlm.164-167.

propaganda negara pemicu kekerasan, pengejaran massal, intimidasi, penahanan berkepanjangan tanpa pengadilan, penghilangan paksa dan pembunuhan secara massal.<sup>78</sup>

Korban-korban pengambinghitaman ini belum tentu bersalah. Tetapi ketika masyarakat terbenam dalam krisis distingsi dan diferinsiasi mereka harus mencari siapa yang bersalah sehingga krisis tersebut terjadi. Dalam keadaan demikian streotip negatif terhadap orang PKI bahwa mereka komunis dan jahat dibangun dalam tidurnya. Begitu krisis mencapai puncaknya stereotip tersebut meledak menjadi kebencian, pengejaran, penganiayaan dan pembunuhan.

Pertama-tama tampak dalam peristiwa pengejaran terhadap anggota dan simpatisan PKI bersifat kolektif. Pengejaran dilakukan oleh sekelompok anggota masyarakat yang serentak dan beramai-ramai melakukan kekerasan. Pengejaran tersebut seolah menjadi benar karena opini publik yang ekstrem dan meruncing dalam menyetujui perbuatan itu. Kedua, pengejaran dan kekerasan terhadap orang-orang PKI terjadi saat krisis di mana hampir semua institusi sosial menjadi lumpuh. Semua tatanan hirarki sosial berantakan, hukum lumpuh dan perbedaan derajat sosial menghilang.

Memakai bahasa Girard, PKI bisa saja bersalah karena memang mereka melakukan sesuatu yang dianggap bersalah oleh masyarakat tetapi di Indonesia PKI adalah suatu kelompok masyarakat distigmatisasi sebagai kelompok yang jahat. Telah lama PKI dianggap sebagai kekuatan jahat yang harus diperangi. PKI terstigma menjadi jahat karena dianggap sebagai komunis sejak tahun 1948 pada

---

<sup>78</sup> *ibid.*, hlm.165.

peristiwa pemberontakan Madiun jauh sebelum peristiwa G30S meletus. Secara serentak kekerasan diarahkan kepada PKI yang telah terstigma sebagai korban. Kekerasan terhadap orang-orang PKI terjadi begitu masyarakat Indonesia berada dalam krisis sosial. Pengejaran demikian biasanya terjadi pada saat krisis. Sebagai akibatnya terbukalah peluang bagi pembentukan gerakan kerumunan massa yang spontan dan destruktif.

Kekerasan sering mewarnai kehidupan masyarakat. Bahkan dunia politik juga sering mendorong kekerasan. Kekerasan mengakibatkan trauma masyarakat. Trauma itu akan berkelanjutan dan mempengaruhi kehidupan politik pula. Adalah fakta bangsa yang dilanda kekerasan karena perpecahan dan peperangan akan sulit mengokohkan dan menyatukan dirinya lagi. Setiap saat, bangsa itu bisa terancam oleh disintegrasi yang mengakibatkan pecahnya kekerasan lagi. Dan trauma kekerasan itu akan berkesinambungan dari generasi ke generasi.<sup>79</sup>

Teori kambing hitam Rene Girard memberikan perspektif baru hubungan agama dengan kekerasan. Sebagaimana telah kita ketahui, kata Rene Girard, *“Religions is always against violence”*. Kekerasan terjadi karena mimesis yang terjadi di ranah agama. Agama yang seharusnya mempersatukan bangsa tetapi dalam tragedi '65 isu-isu agama justru dijadikan senjata untuk menyalpkan PKI.

Rivalitas yang meletus menjadi kekerasan memerlukan kambing hitam untuk memulihkan harmoni sosial. Mekanisme kambing hitam itu senantiasa membidik dan mengejar kaum minoritas etnis, ras dan religius. Jadi, kekerasan, penganiayaan, penjarahan, pembunuhan terhadap PKI dan orang-orang tertuduh

---

<sup>79</sup> Sindhunata, 2000, *Sakitnya Melahirkan Demokrasi*, Yogyakarta: hlm183-186

PKI mengandung tiga stereotipe pengejaran sebagaimana diterangkan Rene Girard. Pertama, masyarakat Indonesia sangat rapuh, rawan dan mudah pecah dalam konflik ketika krisis melanda. Kedua, ketika masyarakat terbenam dalam krisis kemudian mencari kambing hitam untuk dipersalahkan entah mereka bersalah atau tidak. Ketiga, kambing hitam biasanya berasal dari kaum minoritas etnis, ras dan religius. Dalam kasus ini PKI yang dijadikan atau dipilih sebagai korban kambing hitam bukan berasal dari kaum minoritas baik etnis ataupun ras tetapi PKI merupakan kelompok mayoritas yang memiliki jutaan anggota pada waktu itu.

### **C. Orde Baru Berkuasa Sebagai Perwujudan Mimesis**

Sebagaimana telah dibahas mengenai stereotip pengejaran yang pertama dan kedua teori Kambing Hitam Rene Girard pada poin A dan B, sub-bab ini menganalisa mengenai proses mimesis yang dilakukan Suharto terhadap Sukarno. Telah dijelaskan pada bagian landasan teori bahwa mimesis merupakan proses tiru-meniru karena manusia memiliki hasrat untuk menginginkan sesuatu yang dimiliki orang lain. Mimesis menimbulkan kekerasan karena dalam masyarakat terdapat rivalitas untuk mendapatkan sesuatu.

Bangunan masyarakat di mana pun tanpa terkecuali di Indonesia menurut kerangka teori Rene Girard sangat rawan, mudah ambruk, dan gampang terbenam dalam krisis. Kekerasan mudah membara sewaktu-waktu karena di tengah kehidupan masyarakat bertakhta mimesis yaitu rivalitas perebutan objek (terutama kekuasaan dan sumber daya finansial) dan mekanisme pengambinghitaman.



Perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh Suharto terhadap Sukarno merupakan bagian dari upaya mimesis. Dapat dilihat bahwa Supersemar merupakan tahap kedua yang dilakukan oleh Suharto dari “kudeta merangkak”nya terhadap Sukarno.<sup>80</sup> Suharto mencabut ketetapan MPRS tahun 1963 yang mengangkat Sukarno sebagai presiden seumur hidup tetapi sikapnya tersebut sangat bertentangan dengan apa yang ia lakukan sebagai presiden. Suharto rupanya juga menginginkan sebagai penguasa tunggal Indonesia, sebagai presiden yang lama berkuasa hal ini ditunjukan dalam masa kepemimpinannya selama 32 tahun di Indonesia. Ia juga memiliki strategi yang amat licik menetapkan Nasution sebagai ketua MPRS untuk mengukuhkan legitimasi kekuasaan yang ia peroleh dengan cara kudeta terselubung terhadap Sukarno.

Proses mimesis Suharto juga diperlihatkan melalui strateginya untuk mendekati dan merengkuh bantuan pihak sekutu asing yaitu Amerika Serikat untuk menegakkan kediktatorannya. Jika semasa pemerintahan Presiden Sukarno kebijakan luar negeri yang dilakukan lebih dekat dengan Blok Komunis, Suharto lebih cenderung dekat dengan AS yang merupakan lawan dari Blok Komunis. Perang dingin antara Blok Barat yaitu kapitalis dan Blok Timur komunis-sosialis yang pada waktu itu keduanya memiliki kepentingan menerapkan kebijakan luar negerinya kepada Indonesia menyumbang munculnya proses mimesis Suharto terhadap Sukarno.

Suharto melakukan produksi ingatan kepada masyarakat dimulai sejak tahun 1965. Koran-koran Angkatan Darat seperti *Berita Yudha* melaporkan serta

---

<sup>80</sup> Siregar, M.R, *op.cit.*, hlm.198.

mengisahkan kekejaman PKI dalam membunuh para jendral Angkatan Darat. Reproduksi ingatan juga terus dilakukan kepada masyarakat setelah ia naik kursi kekuasaan sebagai presiden. Melalui buku putih yang ditulis oleh Nugroho Susanto ia menarasikan kesaksian sejarah yang dipalsukan tentang PKI. Hal-hal tersebut Suharto lakukan untuk melindungi dan menguatkan legitimasinya di mata masyarakat.<sup>81</sup>

Berbagai upaya dilakukan Suharto untuk naik ke kursi kekuasaan. Mengarang cerita-cerita bohong mengenai G30S dan mengendalikan media massa. Suharto menciptakan suasana di kalangan penduduk sipil bahwa PKI sedang bersiap untuk perang. Provokasi dilakukan agar masyarakat percaya bahwa PKI merupakan ancaman yang membahayakan. Suharto menciptakan akronim Gestapu yang tidak sesuai dengan kepanjangan yang berbunyi Gerakan Tiga Puluh September.<sup>82</sup>

Bahkan selama 23 tahun setelah Suharto merebut kekuasaan dari Sukarno ia masih merasa perlu untuk menyatakan diri bahwa ia tidak melakukan kudeta. Tahun 1988 dalam otobiografinya yang berjudul Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya, Suharto menyatakan bahwa ia tidak pernah menganggap Supersemar sebagai tujuan untuk memperoleh kekuasaan. Supersemar juga bukan alat untuk mengadakan kudeta secara terselubung.<sup>83</sup> Ketika ia mencopot status Sukarno sebagai presiden Indonesia seumur hidup, ia juga mengukuhkan dirinya sebagai penguasa tunggal Indonesia.

---

<sup>81</sup> *ibid.*,

<sup>82</sup> Roosa, John, *op.cit.*, hlm. 40.

<sup>83</sup> Siregar, M.R. *op.cit.*, hlm 179.

Selama tiga puluh dua tahun Indonesia dikuasai oleh rezim tentara yang diktator di bawah pimpinan Suharto. Suharto menjalankan pengambilalihan kekuasaan negara di balik selubung prosedur hukum. Ia menyembunyikan “kudeta merangkak”nya sebagai tindakan murni konstitusional dengan restu Sukarno untuk menggagalkan kup PKI. G30S digunakan sebagai dalih untuk menghancurkan partai komunis serta perebutan tahta kekuasaan di Indonesia. Propaganda yang membesar-besarkan bahaya yang datang dari partai komunis, penahanan massal di kamp-kamp konsentrasi serta keadaan darurat yang dimanfaatkan untuk merebut kekuasaan.

Suharto telah menampilkan diri sebagai juru selamat bangsa dengan menumpas G30S. Rezim Suharto terus menerus menanamkan peristiwa itu dalam pikiran masyarakat melalui semua alat propaganda buku teks, monumen, nama jalan, film, museum dan upacara peringatan. Di bawah kepemimpinan Suharto antikomunisme menjadi agama negara. Bagi Suharto peristiwa G30S membuktikan kebenaran tentang sifat PKI yang khianat dan antinasional. Ia juga mendiskreditkan prinsip yang digalakkan Sukarno yaitu Nasakom yang memberi ruang gerak bagi PKI sebagai komponen politik Indonesia.

Landasan hukum yang digunakan Suharto untuk menguasai Indonesia adalah perintah Presiden Sukarno pada 3 Oktober 1965 yang memberi wewenang kepada Suharto untuk memulihkan ketertiban. Perintah tersebut dikeluarkan dalam keadaan darurat tetapi bagi Suharto situasi darurat tersebut tidak pernah berakhir justru semakin diperpanjang dengan segala upayanya untuk merebut kekuasaan.

Hingga penghujung rezim Suharto pada 1998 pemerintah dan pejabat militer Indonesia tetap mengagung-agungkan “bahaya laten komunisme” untuk menanggapi setiap masalah kerusuhan ataupun pembangkangan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa rezim orde baru di bawah pimpinan Suharto terbentuk karena suatu fantasi atau pengkaburan fakta-fakta yang dibuatnya sendiri.

Kecemburuan, kebencian, iri dan kedengkian sosial merajalela karena dalam kehidupan masyarakat bertakhta mimesis (hasrat tiru-meniru tiada berkesudahan). Mimesis muncul sebagai wujud harmonisasi. Sebagaimana telah diketahui, mimesis merupakan proses tiru-meniru karena manusia memiliki hasrat untuk menginginkan sesuatu yang dimiliki orang lain. Berbagai upaya yang telah dilakukan Suharto untuk merebut kekuasaan Presiden Sukarno merupakan proses mimesis. Suharto menginginkan kekuasaan pemerintahan yang dimiliki oleh Sukarno. Suharto memandang bahwa Sukarno hebat, dan kemudian ia ingin menyamai bahkan melampaui Sukarno. Sukarno semula dijadikan model berubah menjadi rival yang dianggap menghalangi hasrat Suharto untuk menjadi penguasa atau pemimpin. Karena adanya proses mimesis tersebut Suharto melakukan kudeta terhadap Sukarno untuk merebut kekuasaan. Bagi Suharto, Sukarno merupakan rival karena keduanya memiliki hasrat yang sama. Suharto menghendaki agar Sukarno gagal atau kalah agar ia mendapatkan kekuasaan.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Teori Kambing Hitam Rene Girard rasanya masih tetap relevan untuk dipelajari dan digunakan untuk menganalisa kasus kekerasan hingga saat ini. Dalam tesisnya yang utama Girard menyimpulkan bahwa kultur dalam sebuah masyarakat sesungguhnya sangat rapuh, mudah pecah dan mudah terbenam ke dalam krisis. Menurut Girard dalam suatu masyarakat bertahta sebuah rivalitas yang tiada habisnya sehingga sewaktu-waktu dapat terjadi kekerasan. Ia mengatakan bahwa manusia itu saling bersaing dalam menghasratkan sesuatu. Rivalitas tersebut memotivasi manusia untuk bertindak, sehingga sering memicu konflik hingga berujung pada kekerasan.

Pembunuhan massal yang terjadi di Indonesia tahun 1965-1966 kiranya menandai kerapuhan kultur di Indonesia seperti yang telah digambarkan oleh Girard. Sebelum terjadi pertumpahan darah yang begitu besar Indonesia mengalami krisis karena kondisi politik dan ekonomi yang buruk. Di tengah-tengah situasi krisis tersebut terjadilah peristiwa G30S yang selanjutnya makin memperburuk keadaan. G30S menjadi dasar pertumpahan darah yang mengerikan pada akhir tahun 1965. Menyusul peristiwa tersebut PKI dituduh sebagai dalang dari peristiwa berdarah tersebut. Akibatnya pasca G30S terjadi

pengejaran dan pembunuhan terhadap orang-orang PKI. Jutaan orang terbunuh sebagai korban kesewenang-wenangan.

Sebelum tahun 1965 pemerintah Indonesia tidak pernah menimpakan kesalahan kolektif pada sekelompok masyarakat secara keseluruhan. Kaum nasionalis tidak pernah membasmi orang Belanda selama perang kemerdekaan tahun 1945-1949. Setelah peristiwa PRRI/Permesta, Presiden Sukarno tidak pernah menimpakan kesalahan secara kolektif kepada partai PSI dan Masyumi. Ia juga tidak mencap semua anggota PSI dan Masyumi sebagai pengkhianat negara. Pemerintah tidak pernah membunuh seseorang hanya karena mereka anggota kedua partai tersebut.

Situasi di atas justru berbanding terbalik dengan apa yang terjadi pada pertengahan tahun 1965. Tidak pernah terbayang sebelumnya jika Partai Komunis Indonesia (PKI) yang memiliki jutaan pendukung dan mendapat dukungan dari Presiden Sukarno akan hancur lebur ditangan Suharto. Tak pernah terbayang jika partai yang sangat populer ini akan dikorbankan melalui stigma kesalahan kolektif, kebohongan propaganda negara pemicu kekerasan, pengejaran massal, intimidasi, penahanan berkepanjangan tanpa pengadilan, penghilangan paksa dan pembunuhan secara massal.

Tampaknya G30S menjadi dalih yang telah lama ditunggu Suharto untuk menyerang PKI. G30S merupakan bagian dari kudeta merangkak yang dilakukan Suharto untuk menggulingkan kekuasaan Presiden Sukarno. Hingga kini G30S menyisakan misteri karena gerakan tersebut telah gagal sebelum kebanyakan orang sempat mengetahui latar belakang dan keberadaannya. Suharto telah

mengubah riak kecil di tengah samudra revolusi Indonesia menjadi gelombang tsunami politik. Pembunuhan massal terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Orang-orang yang dianggap memiliki keterkaitan dengan PKI ditangkap dan dibunuh begitu saja.

Pembunuhan massal pasca G30S yang terjadi tahun 1965-1966 telah memakan jutaan korban. Semua partai kelas buruh yang diketahui, ratusan ribu pekerja dan para petani pendukung PKI ditangkap, dibunuh, serta sebagian dimasukkan ke dalam kamp-kamp tahanan untuk disiksa dan diinterogasi. Mereka yang menjadi korban pembantaian massal adalah rakyat biasa yang kemungkinan besar tidak tahu menahu dan tidak memiliki keterkaitan dengan peristiwa G30S. Dalam jumlah besar mereka dieksekusi tanpa melalui proses pengadilan.

Pembunuhan massal tahun 1965-1966 di Indonesia merupakan salah satu tragedi kemanusiaan terbesar setelah Nazi. Jumlah korbannya mencapai 500.000-1.000.000 jiwa. Tragedi berdarah ini kemudian melahirkan rejim Orde Baru. Menyusul tragedi tersebut kekuasaan Presiden Sukarno beralih kepada Suharto. Setelah itu Indonesia dipimpin Suharto selama 32 tahun. Di bawah rezim Suharto tidak sedikit rakyat kecil yang mengalami kesulitan. Suharto menerapkan kebijakan melakukan pembubuhan kode “ET” (Eks Tapol) pada KTP milik orang-orang yang melawan kebijakan penguasa. Dampak yang harus ditanggung para korban tertuduh PKI adalah hilangnya hak-hak mereka sebagai warga negara. Mereka mengalami stigmatisasi yang merugikan secara sosial, politik dan ekonomi. Mereka terpisah dari sanak saudaranya akibat penangkapan dan

pembunuhan yang terjadi. Bahkan banyak anak-anak terpisah dari orang tua karena orang tuanya menghilang bahkan terbunuh.

Dampak lain setelah Suharto berkuasa adalah ingatan masyarakat akan apa yang terjadi pada tahun 1965 menjadi kabur dan campur aduk. Masyarakat menjadi sulit membedakan antara peristiwa G30S dan pembunuhan massal karena adanya berbagai upaya pengaburan fakta-fakta. Peristiwa G30S digunakan oleh Suharto untuk menghabisi PKI yang dianggap sebagai penghalang. Tetapi rezim Suharto menanamkan dalam benak masyarakat bahwa G30S merupakan upaya pemberontakan PKI untuk merebut kekuasaan. PKI merupakan “kekuatan jahat” yang harus diperangi bersama karena dicurigai ingin mengubah negara Indonesia menjadi komunis. Dengan begitu pengejaran, penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang PKI dan simpatisannya menjadi “sah” di mata publik. Lebih jauh pengaburan fakta-fakta tersebut menyebabkan tidak adanya upaya hukum yang serius untuk mengadili para pemberi komando maupun para pelaku-pelaku lapangan atas pembantaian massal itu.

Situasi hiruk-pikuk masyarakat yang dilanda krisis dan berujung pada kekerasan tahun 1965-1966 menunjukkan bahwa bangunan masyarakat di Indonesia sangat rawan, mudah ambruk dan mudah terbenam dalam kekerasan. Menurut Girard, kekerasan mudah membara sewaktu-waktu karena di tengah kehidupan masyarakat bertahta mimesis, rivalitas perebutan objek (terutama kekuasaan dan sumber daya finansial) dan mekanisme pengkambinghitaman. Mimesis diperlihatkan oleh Suharto karena ia menginginkan kekuasaan Presiden Sukarno. Rivalitas perebutan objek tampak melalui peristiwa G30S yang



digunakan oleh Suharto untuk menggulingkan kekuasaan Presiden Sukarno. Mekanisme pengkambinghitaman disalurkan kepada orang-orang PKI karena mereka dituduh sebagai dalang G30S. PKI dianggap sebagai kekuatan komunis yang harus disingkirkan. Pengejaran dan pembunuhan besar-besaran terhadap orang-orang PKI dan simpatisannya terjadi karena pada diri mereka telah terstigma sebagai komunis.

Rene Girard mengungkapkan mengenai ramalannya bahwa “Akan datang saat di mana agama tidak mampu lagi meredam kekerasan”. Ramalan profetis tersebut terbukti pada kekerasan yang melanda di Indonesia pada Tragedi '65. Menurut Girard, peristiwa pembunuhan massal tahun 1965-1966 terjadi akibat krisis korban. Kelemahan agama dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengelola kekerasan membuat dunia terjerumus dalam krisis korban. Kelemahan tersebut terbukti pada tragedi berdarah tahun 1965-1966 di Indonesia terjadi menggunakan dalih kesucian agama untuk melawan komunisme.

Belajar dari teori Kambing Hitam Rene Girard yang memiliki tiga stereotip yaitu, pertama, krisis distingsi sosial menghasilkan uniformitas kekerasan. Kedua, hancurnya diferensiasi sosial mengharuskan adanya kambing hitam yang harus dinyatakan bersalah sebagai penyebab krisis. Ketiga, kambing hitam biasanya adalah kelompok minoritas etnis, ras dan religius. Dengan menggunakan teori tersebut untuk menganalisa tragedi '65 di Indonesia diperoleh hasil berikut ini. **Pertama**, masyarakat Indonesia sangat rapuh, rawan dan mudah terbenam ke dalam konflik jika terjadi krisis. Krisis terjadi karena konflik yang berwatak mimesis mengandung rivalitas. Rivalitas menghasilkan kekerasan.

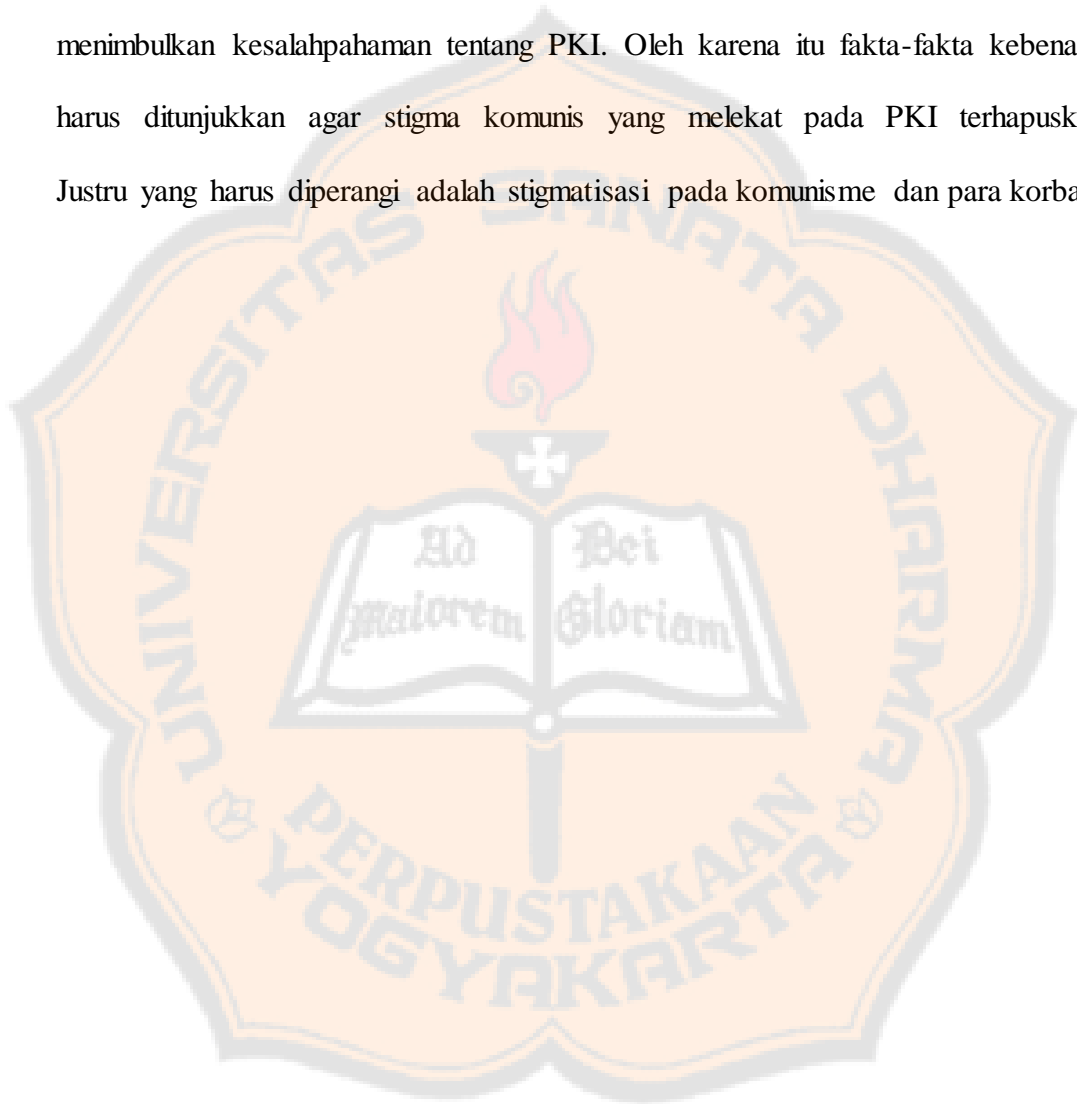
Rivalitas tersebut terlihat ketika Suharto melancarkan kudeta untuk merebut kekuasaan Presiden Sukarno. Dan kekerasan terjadi pada saat pembunuhan massal tahun 1965-1966. **Kedua**, ketika terjadi konflik maka masyarakat akan mencari penyaluran kekerasan melalui kambing hitam. Dalam hal ini yang menjadi korban kambing hitam adalah PKI dan para simpatisannya. **Ketiga**, korban kambing hitam biasanya adalah minoritas etnis, rasa tau agama. Pada kasus kekerasan tahun 1965-1966 yang mejadi korban kambing hitam adalah PKI yang meskipun memiliki tiga juta anggota tetap dipandang sebagai minoritas.

## B. Saran

Skripsi ini merupakan penelitian dasar mengenai Tragedi '65 menggunakan teori Kambing Hitam Rene Girard. Pada hasilnya yang paling maksimal skripsi ini hanya berniat untuk memberikan pemahaman inti pemikiran Girard mengenai mekanisme kambing hitam. Selanjutnya dalam penelitian lain dapat lebih didalami atau bahkan ditolak. Semua ini diharapkan untuk memperkaya informasi mengenai pemikiran Girard serta Tragedi '65 di Indonesia.

Setelah dilakukan penelitian tentang Tragedi '65 dapat dilihat bahwa sejarah Indonesia rentan terhadap kekerasan. PKI selalu didistingsikan sebagai "monster" yang membahayakan. Begitu rapuhnya bangunan masyarakat Indonesia sehingga kultur yang diperlihatkan bukanlah kultur yang mengandung harmoni. Dengan belajar dari Tragedi '65 diharapkan bahwa peristiwa seperti itu tidak akan terulang kembali, apalagi mengingat bahwa konon bangsa Indonesia merupakan bangsa menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan.

Lebih dari pada itu, catatan sejarah tentang PKI yang telah dimanipulasi pada masa Orde Baru harus ada upaya penulisan kembali. Dengan begitu tidak akan terdapat lagi penulisan-penulisan sejarah yang memanipulasi fakta dan menimbulkan kesalahpahaman tentang PKI. Oleh karena itu fakta-fakta kebenaran harus ditunjukkan agar stigma komunis yang melekat pada PKI terhapuskan. Justru yang harus diperangi adalah stigmatisasi pada komunisme dan para korban.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Girard, Rene. 1986, *The Scapegoat*, Baltimore.

\_\_\_\_\_. 1977. *Violence and the Sacred*. London.

Kurniawan, *et. al.* 2013, *Pengakuan Algojo 1965*, Jakarta: Tempo Publishing.

Pambudi, A. 2011, *Fakta dan Rekayasa G30S*, Jakarta: Kompas Penerbit Buku.

Roosa, John. 2006, *Dalih Pembunuhan Massal*, Jakarta: Hasta Mitra.

\_\_\_\_\_, Ratih, dan Farid, eds., 2004, *Tahun Yang Tak Pernah Berakhir*. Jakarta: Institut Sejarah Sosial Masyarakat.

Schwager, Raymund. 1987, *Must There be Scapegoats? Violence and Redemption in the Bible*. San Fransisco.

Setiawan, Hesri. 2003, *Aku Eks Tapol*, Yogyakarta: Galangpress.

Simpson, Bradley R. 2008, *Economists with Guns*, Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama.

Sindhunata. 2006, *Kambing Hitam Teori Rene Girard*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Siregar, M.R. 2007, *Tragedi Kemanusiaan*, Yogyakarta: Resist Book.

Soerojo, Soegiarso 1988, *Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai : G30S/PKI dan Peran Bung Karno*, Jakarta: Rola Sinar Perkasa.

Suharto, 1989. *Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya*. Jakarta: Penerbit Citra Kharisma Bunda

Sulistyo, Heramawan. 2000, *Palu Arit di Ladang Tebu*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

- Sumardianta, J. 2009, *Simply Amazing*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Syamdani. 2008, *PPRI Pemberontakan atau Bukan?*, Yogyakarta: Media Presindo.
- Wardaya, Baskara T., SJ. 2006, *Bung Karno Menggugat! Dari Marhaen, CIA, Pembantaian Massal '65 hingga G30S*. Yogyakarta: Galangpress.
- \_\_\_\_\_, ed. 2012, *Luka Bangsa Luka Kita*. Yogyakarta: Galangpress.
- Ying, Wu Da, et.al. 2015. *Menembus Badai Pengembaraan Seorang Tionghoa-Indonesia Melintasi Rasisme, Kebangsaan, dan Sains*. Yogyakarta: Galangpress.

### SKRIPSI

- Widiarminiati, Luh Putu Ayu, 2006. "Latar Belakang Suksesnya PKI di Indonesia Tahun 1955-1962", *Skripsi*, Universitas Sanata Dharma, *unpublished*.
- Wijami, Lidwina, 1998. "Perkembangan PKI Pemberontak dan Pergantian Pemerintah RI Tahun 1950-1966". *Skripsi*, Universitas Sanata Dharma, *unpublished*.

### WEB

- <http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1994/10/10/0002.html>/diakses pada 16 Februari 2015
- [http://id.m.wikipedia.org/wiki/Maut\\_Hitam/](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Maut_Hitam/) diakses pada tanggal 14 Desember 2014